

REVISI COVID-19



2020 RENCANA KERJA & ANGGARAN PERUSAHAAN

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA



Bandung, 26 Juni 2020

Nomor : 2119/PR.03.04/010500/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Buku
Perihal : **Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2020**

Kepada Yth.

Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia

Selaku Pemegang Saham PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)

Kantor Kementerian BUMN RI, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13

Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Merujuk pada:

1. Surat keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-101/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Badan Usaha Milik Negara,
2. Surat Wakil Menteri Badan Usaha Milik negara I Nomor : S-53/Wk1.MBU/04/2020 tentang Perubahan RKAP 2020 BUMN Wamen I.
3. Pasal 17 Ayat 1, 2 dan 3 Anggaran Dasar PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero).

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tahun 2020, dan mohon mendapat pengesahan dalam kesempatan pertama.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami haturkan ucapan terima kasih.

DIREKSI

PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)

Otong lip
Direktur Utama

Teguh Adi Suryandono
Direktur Bisnis

Tri Hartono Rianto
Direktur Keuangan

PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)

Kantor Pusat:
Jl Moh Toha No 77
Bandung 40253
Tlp : (022)5201501 (10 saluran)
Fax : (022) 5202444
Email : info@inti.co.id

Kantor Cabang:
Wisma Aldiron 2nd floor
Suite 2016
Jl. Gatot Subroto Kav. 72
Jakarta Selatan

LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS
REVISI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN TAHUN 2020

Mengetahui/Menyetujui

DEWAN KOMISARIS
PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)



Unggul Priyanto
Komisaris Utama



Djoko Agung Harijadi
Komisaris

PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)

Kantor Pusat:
Jl Moh Toha No 77
Bandung 40253
Tlp : (022) 5201501 (10 saluran)
Fax : (022) 5202444
Email : info@inti.co.id

Kantor Cabang:
Wisma Aldiron 2nd floor
Suite 2016
Jl. Gatot Subroto Kav. 72
Jakarta Selatan

Daftar Isi

Daftar Isi	i
Daftar Gambar	iii
Daftar Tabel	iv
Executive Summary	1
BAB I. PENDAHULUAN.....	4
I.1 Sejarah Perkembangan Perusahaan.....	4
I.2 Visi dan Misi Perusahaan.....	9
I.2.1 Tujuan Perusahaan.....	9
I.2.2 Budaya Perusahaan.....	10
I.3 Dewan Komisaris dan Direksi.....	10
I.3.1 Dewan Komisaris	10
I.4 Struktur Organisasi.....	11
BAB II. GAMBARAN KINERJA PERUSAHAAN.....	13
II.1 Gambaran Umum	13
II.1.1 Gambaran Umum Perusahaan	13
II.1.2 Asumsi Indeks Makro Ekonomi Indonesia	13
II.1.3 Realisasi Pencapaian Kinerja Tahun 2019	14
II.1.4 Sumber Daya Manusia.....	15
II.1.5 Corporate Social Responsibility (CSR)	16
II.1.6 Beban-beban	17
II.1.7 Pendapatan dan Beban Lain-lain	20
II.1.8 Investasi	21
II.1.9 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	21
II.1.10 Laporan Posisi Keuangan (Neraca)	22
II.1.11 Laporan Arus Kas.....	25
II.2 Laporan Keuangan Konsolidasian.....	26
II.2.1 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	26
II.2.2 Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Konsolidasian	27
II.2.3 Laporan Arus Kas Konsolidasian.....	29
II.2.4 Rasio Keuangan.....	30
II.2.5 Tingkat Kesehatan	31
II.2.6 Key Performance Indikator (KPI)	32
II.2.7 Kontribusi Pajak	33
II.3 Anak Perusahaan	33
II.3.1 PT Inti Pindad Mitra Sejati (IPMS)	33
II.3.2 PT Inti Konten Indonesia (INTENS)	39
II.3.3 Perusahaan Patungan.....	43
II.4 Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)	44
II.4.1 Laporan Keuangan PKBL.....	44
II.4.2 Laporan Aktivitas	45
II.4.3 Laporan Arus Kas.....	46
II.4.4 Kinerja Program Kemitraan.....	46
II.4.5 Tindak Lanjut Keputusan RUPS dan Temuan Auditor Eksternal	47
BAB III. RENCANA KERJA & ANGGARAN PERUSAHAAN TAHUN 2020 DENGAN DAMPAK PANDEMIK COVID-19	55
III.1 Gambaran Umum	55
III.1.1 Perkembangan Ekonomi Global.....	56
III.1.2 Perkembangan Perekonomian Domestik.....	59
III.1.3 Kebijakan Pemerintah.....	61
III.1.4 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020	63

III.1.5	Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020	64
III.1.6	Enterprise Business & Sinergi BUMN	69
III.2	Arahan Bisnis Perusahaan.....	72
III.2.1	Segment Focus	73
III.2.2	Portfolio Focus	73
III.3	Strategi dan Rencana Kerja Perusahaan.....	85
III.3.1	Asumsi Indeks Makro Ekonomi Indonesia	85
III.3.2	Analisis Situasi RKAP 2019	85
III.3.3	Inisiatif Strategi 2020	86
III.3.4	Arahan Umum Perusahaan	92
III.4	Anggaran Perusahaan Tahun 2020.....	98
III.4.1	Target Kinerja Tahun 2020.....	98
III.4.2	Laporan Keuangan Induk Perusahaan	105
III.4.3	Laporan Keuangan Konsolidasian	108
III.4.4	Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)	127
PENUTUP		131
Hal-hal yang Perlu Mendapat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS):		132
BAB IV.	RENCANA KERJA DEWAN KOMISARIS.....	133
IV.1	Pendahuluan.....	133
IV.2	Maksud dan Tujuan.....	133
IV.3	Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris	133
IV.4	Anggaran Dewan Komisaris	134
IV.5	Rencana Kerja dan Indikator Kinerja	134
IV.6	Pengukuran Kinerja	137

Daftar Gambar

Gambar I-1	Sejarah Perkembangan Perusahaan	4
Gambar I-2	Struktur Organisasi Perusahaan	12
Gambar III-1	Grafik Penyebaran Pandemi COVID-19 Nasional	56
Gambar III-2	Grafik Penyebaran Pandemi COVID-19 Spasial	56
Gambar III-3	Grafik PMI Sektor Manufaktur & Jasa	57
Gambar III-4	Grafik Info APBN	60
Gambar III-5	7 (tujuh) Agenda Pembangunan RPJMN IV Tahun 2020 - 2024	62
Gambar III-6	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020	63
Gambar III-7	Rencana Pembangunan Infrastruktur Kominfo	67
Gambar III-8	Ringkasan RUPTL PLN 2019 – 2028	71
Gambar III-9	Target Penjualan Tahun 2020 Per Sektor Kastemer	73
Gambar III-10	Tahapan Penyehatan dan Pertumbuhan Perusahaan	74
Gambar III-11	Portofolio Bisnis Perusahaan 2020	74
Gambar III-12	Produk Unggulan Tahun 2020	74
Gambar III-13	Rencana Pengembangan INTI Smart Industrial Park	76
Gambar III-14	Pabrik INTI di Palasari	77
Gambar III-15	Konverter Kit PT INTI	77
Gambar III-16	Meter Gas Pra Bayar PT INTI	78
Gambar III-17	Perangkat MPOS PT INTI	79
Gambar III-18	e-Voting & e-KTP Reader PT INTI	79
Gambar III-19	Proyeksi Valuasi Ekosistem Digital TMT	81
Gambar III-20	Pengguna Internet di Indonesia 2018	82
Gambar III-21	Internet Economy Indonesia 2019.....	82
Gambar III-22	Partisipasi PT INTI (Persero) dalam Pembangunan PLTS	83
Gambar III-23	PJU LED dengan PV Support	84
Gambar III-24	Inisiatif Strategis Perusahaan Tahun 2020	87
Gambar III-25	Matriks Pencapaian Kontrak Tahun 2020	89
Gambar III-26	Matriks Pencapaian Penjualan Tahun 2020	89
Gambar III-27	Proporsi Kontribusi Optimalisasi Aset 2020.....	91

Daftar Tabel

Table II-1	Asumsi Indeks Makro Ekonomi Indonesia Realisasi 2018, RKAP 2019 dan Realisasi 2019	14
Table II-2	Perolehan Kontrak Penjualan, Penjualan dan Saldo Kontrak Realisasi 2019	14
Table II-3	Produksi Barang dan Jasa Realisasi 2018, RKAP 2019 dan Realisasi 2019	15
Table II-4	Posisi Karyawan Konsolidasi Realisasi 2018, RKAP 2019 dan Realisasi 2019	15
Table II-5	Biaya Tenaga Kerja Konsolidasi Realisasi 2018, RKAP 2019 dan Realisasi 2019..	16
Table II-6	Program Seminar dan Pelatihan Realisasi 2018, RKAP 2019 dan Realisasi 2019.	16
Table II-7	Corporate Social Responsibility (CSR) Realisasi 2018, RKAP 2019 dan Realisasi 2019	16
Table II-8	Beban Operasi dan Usaha Konsolidasi Realisasi 2018, RKAP 2019 dan Realisasi 2019	17
Table II-9	Beban Operasi Konsolidasi Realisasi 2018, RKAP 2019 dan Realisasi 2019	18
Table II-10	Beban Usaha Konsolidasi Realisasi 2018, RKAP 2019 dan Realisasi 2019	19
Table II-11	Pendapatan & Beban Lain-lain Konsolidasi Realisasi 2018, RKAP P2019 dan Realisasi 2019.....	20
Table II-12	Investasi Konsolidasi Realisasi 2018, RKAP 2019 dan Realisasi 2019	21
Table II-13	Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Induk Perusahaan Realisasi 2018, RKAP 2019 dan Realisasi 2019	21
Table II-14	Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Induk Perusahaan Realisasi 2018, RKAP 2019 dan Realisasi 2019	23
Table II-15	Laporan Arus Kas Induk Perusahaan	25
Table II-16	Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Realisasi 2018, RKAP 2019 dan Realisasi 2019.....	26
Table II-17	Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Konsolidasian Realisasi 2018, RKAP 2019 dan Realisasi 2019.....	27
Table II-18	Laporan Arus Kas Konsolidasian Realisasi 2018, RKAP 2019 dan Realisasi 2019	29
Table II-19	Rasio Keuangan Realisasi 2018, RKAP 2019 dan Realisasi 2019	30
Table II-20	Tingkat Kesehatan Perusahaan Realisasi 2018, RKAP 2019 dan Realisasi 2019 ..	31
Table II-21	KPI Perusahaan RKAP 2019 dan Realisasi 2019	32
Table II-22	Kontribusi Pajak Realisasi 2019	33
Table II-23	Kepemilikan Saham PT IPMS.....	33
Table II-24	Gambaran Umum Realisasi 2018, RKAP 2019 dan Realisasi 2019	34
Table II-25	Laporan Laba Rugi PT IPMS Realisasi 2018, RKAP 2019 dan Realisasi 2019	35
Table II-26	Laporan Posisi Keuangan (Neraca) PT IPMS Realisasi 2018, RKAP 2019 dan Realisasi 2019.....	36
Table II-27	Laporan Posisi Arus Kas PT IPMS Realisasi 2018, RKAP 2019 dan Realisasi 2019	38
Table II-28	Kepemilikan Saham PT INTENS	39
Table II-29	Gambaran Umum PT INTENS Realisasi 2018, RKAP 2019 dan Realisasi 2019 ...	39
Table II-30	Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain PT INTENS Realisasi 2018, RKAP 2019 dan Realisasi 2019	40
Table II-31	Laporan Posisi Keuangan (Neraca) PT INTENS Realisasi 2018, RKAP 2019 dan Realisasi 2019.....	41
Table II-32	Laporan Posisi Arus Kas PT INTENS Realisasi 2018, RKAP 2019 dan Realisasi 2019	43
Table II-33	Laporan Posisi Keuangan PKBL Realisasi 2018, RKAP 2019 dan Realisasi 2019..	44
Table II-34	Laporan Aktivitas PKBL Realisasi 2018, RKAP 2019 dan Realisasi 2019	45
Table II-35	Laporan Arus Kas PKBL Realisasi 2018, RKAP 2019 dan Realisasi 2019	46
Table II-36	Kinerja Program Kemitraan	47
Table III-1	Confirmed Cases COVID-19.....	57
Table III-2	Proyeksi PDB Negara di Dunia Tahun 2020	59

Table III-3	Peran Perusahaan dalam RJPMN 2020 - 2024	62
Table III-4	10 Besar Anggaran Belanja K/L RAPBN 2020	64
Table III-5	Rincian Anggaran Infrastruktur RAPBN 2020 (dalam Triliun Rupiah).....	65
Table III-6	Potensi Proyek KPBU	66
Table III-7	Target Cluster Telekomunikasi dalam Renstra KBUMN 2015 - 2019	72
Table III-8	Rincian <i>Quick Win Project</i>	73
Table III-9	Rincian <i>Business Continuance Project</i> Tahun 2020 Berdasarkan Portfolio Bisnis .	75
Table III-10	Asumsi Indeks Makro Ekonomi Indonesia RKAP 2019, Realisasi 2019 dan RKAP 2020	85
Table III-11	Target Tahun 2020 Berdasarkan Inisiatif Strategis.....	88
Table III-12	Aset PT INTI (Persero)	90
Table III-13	Usulan Rencana Jangka Pendek Pemanfaatan Aset Atas Dasar Kajian Konsultan.	90
Table III-14	Perolehan Kontrak Penjualan, Penjualan dan Saldo Kontrak RKAP 2019, Realisasi 2019 dan RKAP 2020.....	99
Table III-15	Posisi Karyawan Konsolidasi RKAP 2019, Realisasi 2019 dan RKAP 2020	99
Table III-16	Beban Tenaga Kerja Konsolidasi RKAP 2019, Realisasi 2019 dan RKAP 2020 ..	100
Table III-17	Biaya Seminar dan Pelatihan RKAP 2019, Realisasi 2019 dan RKAP 2020	100
Table III-18	Corporate Social Responsibility (CSR) RKAP 2019, Realisasi 2019 dan RKAP 2020	101
Table III-19	Tabel Biaya Usaha dan Operasi RKAP 2019, Realisasi 2019 dan RKAP 2020...	102
Table III-20	Beban Operasi Konsolidasi RKAP 2019, Realisasi 2019 dan RKAP 2020.....	103
Table III-21	Beban Usaha Konsolidasi RKAP 2019, Realisasi 2019 dan RKAP 2020	103
Table III-22	Pendapatan dan Beban Lain-lain Konsolidasi	104
Table III-23	Investasi Konsolidasi RKAP 2019, Realisasi 2019 dan RKAP 2020	105
Table III-24	Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Induk Perusahaan	106
Table III-25	Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Induk Perusahaan RKAP 2019, Realisasi 2019 dan RKAP 2020	106
Table III-26	Laporan Arus Kas Induk Perusahaan RKAP 2019, Realisasi 2019 dan RKAP 2020	108
Table III-27	Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian RKAP 2019, Realisasi 2019 dan RKAP 2020.....	109
Table III-28	Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Konsolidasian RKAP 2019, Realisasi 2019 dan RKAP 2020.....	110
Table III-29	Laporan Arus Kas Konsolidasian RKAP 2019, Realisasi 2019 dan RKAP 2020..	112
Table III-30	Rasio Keuangan RKAP 2019, Realisasi 2019 dan RKAP 2020	113
Table III-31	Tingkat Kesehatan Perusahaan RKAP 2020	114
Table III-32	<i>Key Performance Indikator</i> RKAP 2020	114
Table III-33	Kontribusi Pajak RKAP 2020	115
Table III-34	Kepemilikan Saham PT IPMS.....	116
Table III-35	Kepemilikan Saham PT INTENS	117
Table III-36	Gambaran Umum PT IPMS RKAP 2019, Realisasi 2019 dan RKAP 2020.....	117
Table III-37	Laporan Laba Rugi Komprehensif PT IPMS RKAP 2019, Realisasi 2019 dan RKAP 2020	118
Table III-38	Laporan Posisi Keuangan (Neraca) PT IPMS RKAP 2019, Realisasi 2019 dan RKAP 2020	119
Table III-39	Gambaran Umum PT INTENS RKAP 2019, Realisasi 2019 dan RKAP 2020	122
Table III-40	Laporan Laba Rugi Komprehensif PT INTENS RKAP 2019, Realisasi 2019 dan RKAP 2020.....	123
Table III-41	Laporan Posisi Keuangan (Neraca) PT INTENS RKAP 2019, Realisasi 2019 dan RKAP 2020.....	124
Table III-42	Laporan Arus Kas PT INTENS RKAP 2019, Realisasi 2019 dan RKAP 2020	126

Table III-43	Laporan Posisi Keuangan PKBL RKAP 2019, Realisasi 2019 dan RKAP 2020	127
Table III-44	Laporan Aktivitas PKBL RKAP 2019, Realisasi 2018 dan RKAP 2020	128
Table III-45	Laporan Arus Kas PKBL RKAP 2019, Realisasi 2019 dan RKAP 2020	129
Table III-46	Kinerja Program Kemitraan	130
Table IV-1	Anggaran Dekom	134
Table IV-2	Rencana Kerja Dekom.....	135
Table IV-3	KPI Dewan Komisaris	136
Table IV-4	Tabel Skor Kinerja Dewan Komisaris	137

Executive Summary

Rencana Kerja Anggaran Perusahaan tahun 2019 telah dijadikan pedoman bagi Manajemen dan karyawan dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2019. Untuk mencapai hal tersebut seluruh unsur perusahaan telah berusaha bekerja keras untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan melalui Program Nawacita yaitu melalui Peraturan Presiden Nomor: 2 Tahun 2015 Pemerintah menerbitkan Buku Rencana Pemerintah Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015-2019. VISI PEMBANGUNAN NASIONAL untuk tahun 2015-2019 adalah: Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong dalam Visi yang diwujudkan melalui 7 (tujuh) MISI PEMBANGUNAN yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Nawacita terdiri dari beberapa sektor antara lain kedaulatan pangan, energi, kemaritiman, pariwisata dan industri, infrastruktur, sumber daya manusia, dan perbatasan. Yang masing masing dari sektor tersebut memiliki proyek unggulan yang akan diserahkan pengerjaannya ke perusahaan milik negara atau swasta. Untuk proyek unggulan di sektor infrastruktur ICT antara lain pembangunan broadband menjadi 4G, efisiensi Industri *Security & Government*, *E- Government*, *E-Commerce*, Digitalisasi, dan *Government Public Cyber Relation*.

Sesuai dengan strategi bisnis INTI untuk lima tahun kedepan sesuai dengan visinya yaitu *Best Smart Digital Devices Provider in the Region*, dimana mulai tahun 2017 perusahaan bergerak di tiga portofolio bisnis yaitu *Smart Devices*, *Smart Application*, dan *Smart Integrator/EPC*. Peluang pasar yang akan dituju oleh INTI kedepannya yaitu *Operator*, *Enterprise*, *Government*, dan *Defense*. Untuk pengelompokan produk yang kedepannya berdasarkan *Devices*, *Application*, dan *Network*.

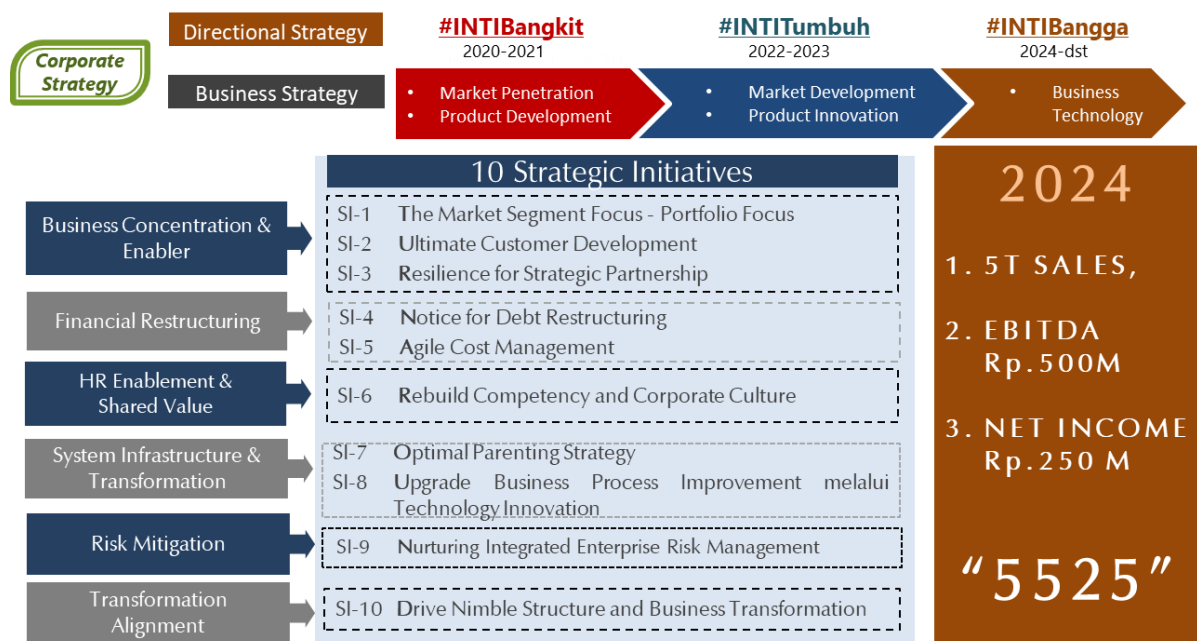
Namun demikian, tahun 2019 dilalui dengan banyak tantangan antara lain tantangan cash flow yang menurun akibat adanya piutang yang tidak tertagih dalam jumlah yang cukup signifikan serta tingginya beban utang kepada lembaga keuangan yang merupakan dampak dari *cost overrun* proyek TITO dan SMP BBM (RFID Pertamina) yang belum diselesaikan. Kondisi ini berdampak pada kinerja perusahaan secara umum dengan terpengaruhnya modal kerja yang tersedia untuk menyelesaikan seluruh kontrak – kontrak yang telah diperoleh Perusahaan. Dengan kondisi ini, berikut realisasi keuangan tahun 2019.

Laporan Keuangan Konsolidasi Tahun 2019:

- Hasil perolehan Kontrak tahun 2019 direalisasikan sebesar Rp. 653,56 Miliar atau 18,3% terhadap RKAP. Sedangkan realisasi penjualan sebesar Rp. 395,38 Miliar atau 14,4% terhadap RKAP 2019.
- Laba periode tahun berjalan sebesar Rp. (434,76) Miliar.
- Pada laporan Posisi Keuangan (Neraca), nilai aset sebesar Rp. 1.393,3 Miliar atau 76,7% terhadap Realisasi 2019. Nilai kewajiban ditargetkan sebesar Rp. 1.661,9 Miliar dan ekuitas negatif Rp. (268,64) Miliar.

Dengan realisasi tahun 2019 tersebut diatas, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002, maka pada tahun 2019 perusahaan akan memperoleh kategori TIDAK SEHAT “CCC” dengan skor 29,7.

Dengan tahun 2019 ditutup dengan kinerja yang kurang memuaskan, pada tahun 2020 Perusahaan melaksanakan strategi yang berbeda. Perusahaan akan fokus untuk melakukan restrukturisasi dan mempersiapkan fundamental Perusahaan yang lebih solid. Diharapkan dengan fokus pada restrukturisasi di seluruh lini utama Perusahaan, maka kinerja Perusahaan akan mencapai target yang telah ditetapkan. Berikut inisiatif strategis dan program strategis untuk RKAP tahun 2020, sesuai dengan program jangka panjang perusahaan.



Dengan program strategis tersebut diatas, maka gambaran umum RKAP 2020 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

I.1 Sejarah Perkembangan Perusahaan

Sejarah Perusahaan dapat digambarkan seperti Gambar I-1. Perusahaan didirikan sebagai evolusi dari kerjasama PN Telekomunikasi dan Siemens AG pada tahun 1966. Kerjasama ini berlanjut pada pembentukan Pabrik Telepon dan Telegraf (PTT) sebagai Bagian dari LPP Postel pada tahun 1968. Pada tahun 1974, bagian ini dipisahkan dari LPP Postel menjadi sebuah Perseroan Terbatas yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Departemen Perhubungan.

Dasar pendirian Perusahaan ini adalah:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No: 34 tahun 1974 tanggal 23 September 1974 tentang Penyetoran Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Industri Telekomunikasi;
- Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No: Kep-1771/MK/IV/12/1974 tanggal 28 Desember 1974 tentang Penetapan Modal Perusahaan Perseroan.

Gambar I-1 Sejarah Perkembangan Perusahaan



Sumber: PT INTI (Persero)

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1989 tertanggal 28 Agustus 1989, PT INTI (Persero) masuk sebagai salah satu industri strategis yang pengelolaannya berada di bawah Badan Pengelola Industri Strategis atau BPIS. Pada tahun 1998, dengan didahului oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No: 12 tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) tertanggal 17 Januari 1998 yang memindahkan peran pengelolaan Persero dari Menteri yang membawahi dan bertanggung jawab atas bidang teknis Persero kepada Menteri Keuangan, PT INTI (Persero) berada di bawah pengelolaan Menteri Pemberdayaan Badan Usaha Milik Negara sebagai kuasa Pemegang Saham.

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: 036/M-PBUMN/1998, sejak tanggal 07 Agustus 1998 kepemilikan saham PT INTI (Persero) dialihkan sepenuhnya kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pakarya Industri Strategis, sebuah *holding company* yang membawahi sepuluh BUMN strategis sebagai anak perusahaan. Namun dengan dilikuidasinya PT BPIS (Persero) pada tahun 2002, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2002 saham PT INTI (Persero) kembali dimiliki dan dikuasai oleh Negara Republik Indonesia di bawah pengelolaan Menteri BUMN.

Periode 1974 – 1984

PT INTI (Persero) resmi berdiri pada tanggal 30 Desember tahun 1974. Produk-produk INTI diantaranya adalah radio sonde, radio *High Frequency* (HF), radio *Very High Frequency* (VHF), pesawat telepon dan stasiun bumi untuk Sistem Komunikasi Satelit Domestik (SKSD) Palapa. Produk stasiun bumi yang disebut terakhir ini mencatatkan sejarah dalam perkembangan INTI dengan memberikan kontribusi pada prestasi penjualan tertinggi di periode ini, yaitu sebesar 24,3 Miliar rupiah di tahun 1981.

Fasilitas produksi yang dimiliki INTI pada periode ini antara lain:

- Pabrik Perakitan Telepon;
- Pabrik Perakitan Peralatan Transmisi;
- Pabrik Mekanik dan Plastik;
- Laboratorium Software Komunikasi Data (PACKSATNET) bekerjasama dengan Logitech.

Kerjasama Teknologi yang pernah dilakukan pada era ini antara lain dengan Siemens AG, BTM, PRX, dan Japan Radio Company (JRC). Pada era tersebut produk Pesawat Telepon Umum Koin (PTUK) INTI menjadi standar Perumtel (sekarang Telkom).

Periode 1985-1998

Didasarkan pada program pemerintah untuk melakukan digitalisasi infrastruktur telekomunikasi di Indonesia, INTI ditunjuk sebagai pemasok tunggal Sentral Telepon Digital Indonesia (STDI). Pelaksanaan program ini dilakukan melalui sebuah perjanjian *Technical and Business Cooperation Agreement* (TBCA) antara INTI dengan Siemens AG.

Fasilitas produksi terbaru yang dimiliki INTI pada masa ini melengkapi fasilitas yang sudah ada sebelumnya, diantaranya adalah Pabrik Sentral Telepon Digital Indonesia (STDI) sebagai pabrik STDI pertama di Indonesia yang menggunakan teknologi produksi *Through Hole Technology* (THT). Pabrik STDI berkapasitas 150.000 Satuan Sambungan Telepon (SST) per tahun ini dibangun pada tahun 1984 dan produksi pertamanya sebesar 10.000 SST diluncurkan pada tahun 1985. Di kemudian hari kemampuan pabrik ini dilengkapi juga dengan teknologi produksi *Surface Mounting Technology* (SMT).

Produk STDI ini berkontribusi sangat signifikan bagi pertumbuhan penjualan dan laba INTI. Walaupun pada tahun 1990 pemerintah membuka persaingan dengan mengizinkan dua pemasok sentral digital lainnya, yaitu AT&T dan NEC, namun sampai dengan tahun 1998 INTI masih tetap menjadi *market leader* dalam hal pangsa pasar infrastruktur telekomunikasi, yaitu sebesar 60% dari total pasar nasional.

Dengan memanfaatkan fasilitas pabrik ini pula, ruang lingkup produk INTI semakin lengkap dengan hadirnya produk-produk baru seperti *Pulse Code Modulation* (PCM), *Private Automatic Branch Exchange* (PABX), dan pesawat telepon meja INTI 111 yang semuanya merupakan produk lisensi dari Siemens AG. Disamping itu INTI juga memproduksi perangkat-perangkat hasil pengembangan sendiri seperti Stasiun Bumi Kecil (SBK), *High Frequency* (HF) *Radio*, *Digital Microwave Radio* (DMR), Sistem Telepon Kendaraan Bergerak (STKB), Pesawat Telepon Umum *Coin Box* dan Pesawat Telepon Umum Swalayan (PTUS).

Sejak tahun 1989, produk-produk INTI dikelompokkan dalam tiga kelompok produk, yaitu:

- (1) produk sentral;
- (2) produk transmisi; dan
- (3) produk terminal atau CPE.

Kerjasama Teknologi yang pernah dilakukan pada periode ini antara lain:

- Bidang sentral dengan Siemens AG;
- Bidang transmisi dengan Japan Radio Company;
- Bidang CPE dengan Siemens AG, BTM, Tamura, Sapura, dan Tatung TEL.

Dari ketiga kategori produk tersebut, produk yang memberikan kontribusi terbesar dalam penjualan INTI adalah produk sentral.

Pada era ini, INTI memiliki reputasi dan prestasi yang signifikan, yaitu:

- Menjadi pionir dalam proses digitalisasi sistem dan jaringan telekomunikasi di Indonesia;
- Bersama Telkom telah berhasil dalam proyek otomatisasi telepon di hampir seluruh ibu kota kabupaten dan ibu kota kecamatan di seluruh wilayah Indonesia.

Pada periode ini, tepatnya tahun 1998, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1989 INTI masuk ke dalam kelompok industri strategis yang dikelola dan dibina oleh BPIS. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan BUMN Nomor 036/M-PBUMN/1988, PT INTI (Persero) masuk menjadi anak perusahaan dari PT BPIS (Persero) bersama delapan Persero lainnya dan satu lembaga elektronika nasional yang pada saat itu berada di bawah pengelolaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Bisnis terbesar pada periode ini adalah Sentral Telepon Digital Indonesia (STDI). Pada periode ini pula PT INTI (Persero) berhasil mengembangkan produk Stasiun Bumi Kecil (SBK) 3 kanal dan Sentral Telepon Digital Indonesia Kecil (STDI-K).

Periode 1998-2002

Dengan berakhirnya TBCA dengan Siemens AG, INTI mengukuhkan diri sebagai penyedia solusi *engineering*, terutama sebagai *system integrator* untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia, tidak terkecuali pembangunan infrastruktur telekomunikasi seluler. Tidak kurang dari 2000 BTS telah dibangun oleh INTI di seluruh penjuru Indonesia.

Pada periode ini aktivitas *manufacturing* dipersiapkan untuk dipindahkan kepada anak perusahaan. Pada tahun 2002, Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor: 52 Tahun 2002 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, PT PINDAD, PT DAHANA, PT Krakatau Steel, PT Barata Indonesia, PT Boma Bisma Indra, PT INKA, PT INTI dan PT LEN dan Pembubaran PT BPIS (Persero), maka PT INTI kembali berada dalam tanggung jawab Kementerian Negara Pendayagunaan BUMN. Bisnis terbesar pada periode ini adalah pembangunan jaringan seluler.

Periode 2003-2008

Pada era ini kerjasama teknologi tidak lagi terkonsentrasi pada Siemens, tetapi dilakukan secara berimbang (*multi principal*) dengan beberapa perusahaan multinasional dari Eropa dan Asia. Aktivitas manufaktur tidak lagi ditangani sendiri oleh INTI, tetapi secara *spin-off* dengan mendirikan anak-anak perusahaan dan usaha patungan, seperti:

- Bidang CPE, dibentuk anak perusahaan bernama PT INTI PISMA International yang bekerja sama dengan JITech International, bertempat di Cileungsi Bogor
- Bidang mekanik dan plastik, dibentuk usaha patungan dengan PT PINDAD bernama PT IPMS, berkedudukan di Bandung, yang resmi berdiri di bulan Juli 2004.
- Bidang-bidang *switching*, akses dan transmisi, dirintis kerjasama dengan beberapa perusahaan multinasional seperti SAGEM, MOTOROLA, ALCATEL, ERICSSON, SAMSUNG.

Bisnis terbesar pada periode ini adalah CDMA, RMJ (*regional metro junction*) dan jaringan akses *fiber optic* dan *Out Site Plant* (OSP), *digital microwave link*, pembangunan tower, CME dan *power supply* serta *indoor coverage*.

Periode 2009-2014

PT INTI (Persero) memantapkan langkahnya untuk memasuki bisnis solusi *engineering*, *system integrator* dan pengembangan produk-produk *genuine*. Beberapa produk *genuine* unggulan PT INTI antara lain: Smart PBX, GPA, IPUMC, FFWS, I-PERISALAH, KWH Meter, dan MSAN. Sebagai *system integrator*, PT INTI (Persero) memfokuskan diri pada segmen pasar Telco, Celco dan *Private Enterprises*. Untuk pasar Telco, PT INTI (Persero) menginisiasi ide Modernisasi Jaringan akses Tembaga milik PT Telkom, Tbk di seluruh Indonesia menjadi jaringan akses *fiber optic* dengan menggunakan teknologi MSAN, GPON dan FTTH (*Fiber To The Home*) dengan pola *Trade In Trade Off* atau lebih dikenal dengan nama proyek TITO. Melalui proyek TITO ini PT INTI (Persero) kembali membangun kapasitas manufaktur di dalam industri telekomunikasi untuk perangkat dan asesoris optik antara lain: *Fiber Termination Management* (FTM), *Optical Splitter*, *Fiber Optic Accesoris*, *Optical Network Termination* (ONT), *Optical Drop Cable*, *Fiber Management System* (FMS).

Di sektor Celco, PT INTI (Persero) menginisiasi proyek Rural BTS untuk PT Indosat, membangun OSP (*outside plant*) *fiber optic backbone* untuk BTS untuk PT Telkomsel dan PT XL Axiata, serta menyediakan antenna untuk operator seluler tersebut.

Untuk segmen pasar *Private Enterprise*, PT INTI menyediakan solusi PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) untuk PT PLN, menyediakan layanan pengelolaan perangkat IT PT Telkom dengan pola *seat management* yang berupa pengelolaan sekitar 35.000 *seat* (meliputi komputer, laptop, printer maupun proyektor) mulai dari *instalasi*, *application management*, dan *dismantle*. Selain itu, PT INTI s(Persero) memiliki solusi *Smart Clinic* yang diperuntukkan bagi pengelola layanan kesehatan seperti rumah sakit maupun klinik.

Periode 2014-sekarang

PT INTI (Persero) memantapkan langkahnya untuk memasuki bisnis solusi *engineering*, sistem integrator dan pengembangan produk-produk *genuine*. Tidak hanya sektor Telekomunikasi dan Informasi (ICT), PT INTI (Persero) memperluas portofolionya ke sektor Energi, *Digital Service* dan Internet of Things, serta merintis bisnis baru dalam bidang Pertahanan dan Keamanan.

Pengembangan produk produk *genuine* INTI lainnya berlanjut terus, seperti *Converter Kit* untuk BBM ke Gas, Smart Meter untuk Gas dan Listrik, *Mobile Point of Sales*, Pembaca KTP Elektronik, dan sebagainya. INTI juga bekerja sama dalam pengembangan dan produksi dengan berbagai lembaga penelitian dan instansi, seperti untuk produk *Automatic Dependent Surveillance Broadcast* (ADS-B), Sistem Informasi Dini Lalu Lintas (SINDILA) dan *Structure Health Management System* (SIMBAGAS). Dalam sektor Energi,

PT INTI (Persero) menyediakan solusi PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya), Penerangan Jalan Umum, Lampu LED, dan sebagainya.

I.2 Visi dan Misi Perusahaan

Visi Perusahaan

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan Tahun 2020 - 2024, Visi Perusahaan adalah **“Menjadi Produsen Smart Products Terbaik di Sektor Telekomunikasi di Indonesia “**

Misi Perusahaan

Perwujudan visi Perusahaan sebagaimana dituangkan di atas akan dicapai melalui upaya-upaya yang terkandung dalam misi Perusahaan sebagai berikut:

1. Meningkatkan nilai pemangku kepentingan;
2. Bersama pelanggan menciptakan solusi produk-produk yang smart dan inovatif yang mampu menyelesaikan permasalahan pelanggan dengan efektif dan efisien, serta memaksimalkan kandungan TKDN;
3. Meningkatkan business operational excellence perusahaan melalui pengembangan kompetensi Human Capital; dan
4. Menjadi mitra pemerintah dan sinergi sesama BUMN dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

I.2.1 Tujuan Perusahaan

Maksud dan tujuan pendirian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara umum sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara adalah untuk (a) memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; (b) mengejar keuntungan; (c) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; (d) menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; dan (e) turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Disamping itu secara khusus tujuan pendirian Perusahaan sebagaimana dinyatakan dalam akta pendiriannya adalah untuk melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, khususnya di bidang industri telekomunikasi, elektronika, informatika, kelistrikan atau energi serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dengan menghasilkan barang/jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat.

Oleh karenanya selaras dengan visi, misi dan tujuan pendiriannya, perusahaan menetapkan tujuan strategis jangka panjang perusahaan dalam indikator-indikator terukur yang terdiri atas:

1. Pertumbuhan nilai ekonomis perusahaan yang dinyatakan dalam indikator *perspektif finansial*;

2. Pembangunan persepsi pelanggan yang dinyatakan dalam indikator perspektif pelanggan; dan
3. Peningkatan produktivitas, efektivitas dan efisiensi yang dinyatakan dalam indikator proses internal;

Tujuan perusahaan jangka panjang yang merupakan penjabaran dari visi dan misi perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Menjadi perusahaan yang memiliki kinerja yang baik, ditinjau dari perspektif keuangan, pelanggan, proses internal maupun organisasi dan SDM.
2. Menjadi perusahaan yang mampu meningkatkan kesejahteraan karyawan.
3. Memberikan nilai yang tinggi untuk produk dan jasa kepada pelanggan.
4. Memberikan nilai kembali yang memadai atas saham.

Turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya dan khususnya di bidang industri telekomunikasi, pertahanan, elektronika dan informatika dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang berlaku bagi Perseroan Terbatas.

I.2.2 Budaya Perusahaan

Nilai-Nilai Perusahaan

Untuk menunjang keberhasilan pencapaian tujuan perusahaan, PT INTI (Persero) akan meningkatkan kemampuan sumber manusia dalam bentuk peningkatan kompetensi dan komitmen agar perusahaan akan berjalan dengan efektif. Sesuai dengan Nilai, Budaya dan Perilaku Perusahaan diatas, dalam setiap aktivitasnya, pegawai perusahaan diharapkan memiliki nilai-nilai yaitu:

- *Amanah;*
- *Kompeten;*
- *Harmonis;*
- *Loyal;*
- *Adaptif;*
- *Kolaboratif.*

Yang selanjutnya disingkat menjadi AKHLAK, sesuai dengan Core Values BUMN yang telah diresmikan oleh Kementerian BUMN.

I.3 Dewan Komisaris dan Direksi

I.3.1 Dewan Komisaris

KOMISARIS

Susunan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: SK-99/MBU/05/2017 tanggal 23 Mei 2017, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia, maka susunan Dewan Komisaris PT INTI (Persero) sebagai berikut pada tanggal 31 Desember 2019:

- Komisaris Utama : Unggul Priyanto
- Komisaris : Djoko Agung Harijadi
- Komisaris : Nuning Sri Rejeki Wulandari
- Sekretaris Komisaris : Suropto

Yang selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: SK-4/MBU/01/2020 tanggal 3 Januari 2020 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas, Dan Pengangkatan Anggota – Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta II, mengangkat Sdri. Nuning Sri Rejeki Wulandari sebagai Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta II, yang secara otomatis pemberhentian yang bersangkutan di jajaran dewan komisaris PT INTI berhenti semenjak pengangkatan sebagai Dewan Komisaris di BUMN Lain, sebagaimana dipertegas dengan Surat Menteri BUMN S-256/MBU/D7/04/2017 hal Berakhirnya masa jabatan Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi BUMN. Maka dari itu susunan Dewan Komisaris PT INTI (Persero) menjadi seperti berikut:

- Komisaris Utama : Unggul Priyanto
- Komisaris : Djoko Agung Harijadi
- Sekretaris Komisaris : Suropto

DIREKSI

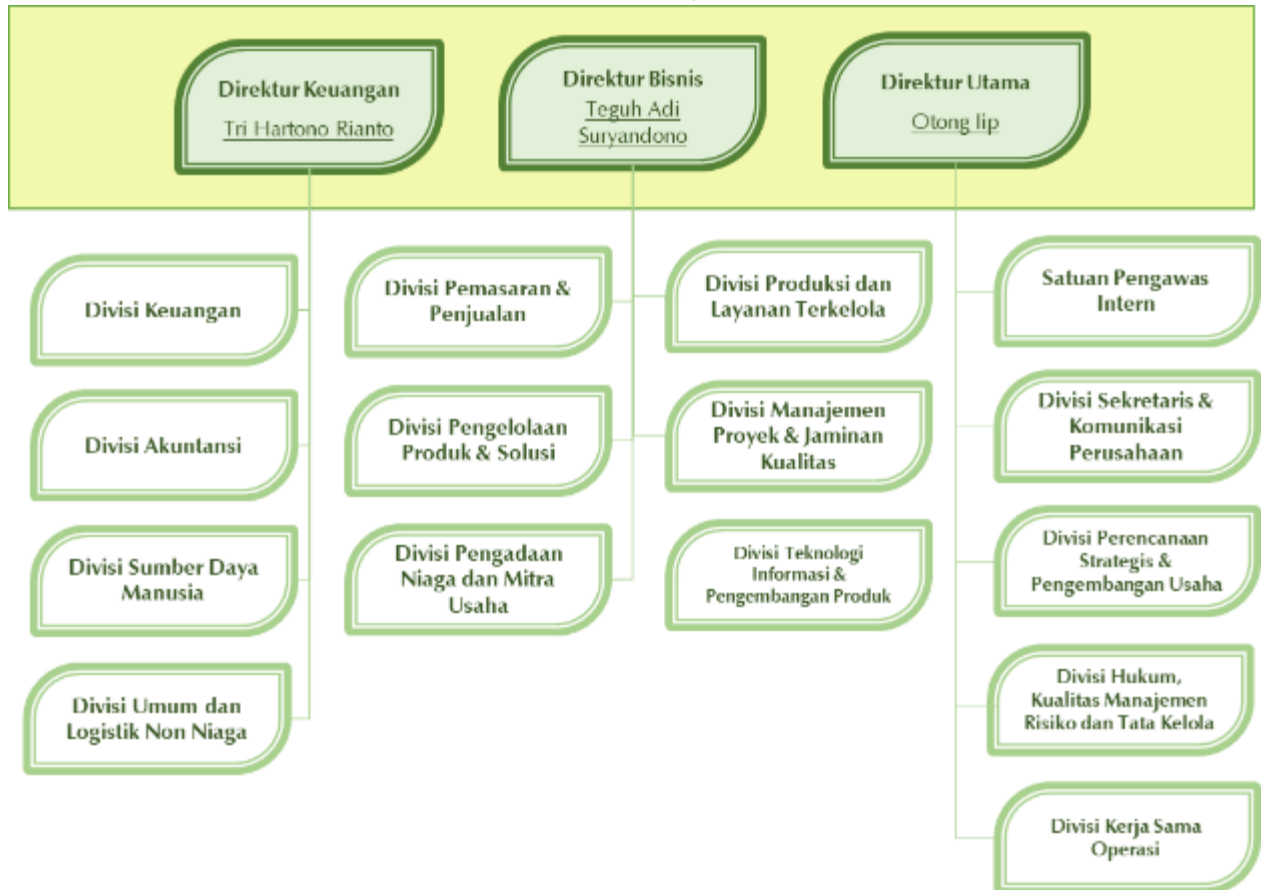
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-161/MBU/07/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia tertanggal 24 Juli 2019 dan Nomor: SK-223/MBU/10/2019 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia tertanggal 17 Oktober 2019, susunan Direksi PT INTI (Persero) menjadi sebagai berikut:

- Direktur Utama : Otong lip
- Direktur Keuangan : Tri Hartono Riyanto
- Direktur Bisnis : Teguh Adi Suryandono

I.4 Struktur Organisasi

Untuk menghadapi perubahan dan persaingan yang semakin ketat dalam industri telekomunikasi dan informasi serta untuk melakukan adaptasi dengan lingkungan internal maupun eksternal Perusahaan diperlukan perubahan yang bersifat strategis guna mendukung tercapainya visi, misi dan tujuan jangka panjang Perusahaan. Struktur Organisasi Perusahaan merujuk pada Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-56/MBU/2014 tanggal 18 Maret 2014 tentang Pemberhentian & Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia. Selanjutnya guna mempersiapkan organisasi agar lebih lincah, maka melalui Surat Keputusan Direksi No. KN-016/2019 tanggal 19 Desember 2019, telah ditetapkan perubahan struktur organisasi menjadi organisasi yang lebih *customer centric* yaitu sebagai berikut:

Gambar I-2 Struktur Organisasi Perusahaan



Sumber: PT INTI (Persero)

BAB II. GAMBARAN KINERJA PERUSAHAAN

II.1 Gambaran Umum

II.1.1 Gambaran Umum Perusahaan

Dengan memperhatikan kinerja Perusahaan sampai dengan akhir tahun 2019 serta potensi kontrak baru yang akan diperoleh, Perolehan kontrak penjualan konsolidasi tahun 2019 sebesar Rp. 653,56 Miliar terdiri dari kontrak penjualan induk perusahaan sebesar Rp. 597,24 Miliar dan kontrak penjualan anak perusahaan yang dapat dikonsolidasikan sebesar Rp. 56,32 Miliar. Perusahaan memrealisasikan rugi komprehensif konsolidasi sebesar negatif Rp. 434,76 Miliar. Biaya usaha terealisasi sebesar 73,5 % sedangkan biaya operasi terealisasi hanya sebesar 15,1% dari RKAP 2019.

Faktor utama belum tercapainya kinerja penjualan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RKAP 2019, yaitu adanya keterbatasan kas Perusahaan, yang merupakan imbas dari adanya piutang usaha yang belum tertagih dan ketersediaan modal kerja yang terbatas dari Lembaga Keuangan akibat posisi kinerja keuangan Perusahaan yang belum baik. Realisasi arus kas operasional yang berasal dari penerimaan pelanggan Rp. 429,52 Miliar. Dengan realisasi kinerja seperti gambaran di atas, pada akhir tahun Tingkat Kesehatan Perusahaan diperkirakan memperoleh skor 29,7 atau Tidak Sehat “CCC”.

Di sisi lain, Perusahaan berhasil mendapatkan tambahan kontrak *multi years* sesuai yang ditargetkan, antara lain kontrak BRIBOX dan BRISAT yang diperoleh dari Bank BRI, kontrak *service point* dan instalasi yang diperoleh dari ICON+, diluar kontrak recurring yang selama ini telah ada, seperti kontrak TOPO dari BP3TI, managed service dari NEC, IKR migrasi dan pelolosan dari TELKOM.

Saat ini, Perusahaan telah mengupayakan peningkatan pendapatan lain-lain melalui optimalisasi aset yang ada yang ditunjukkan dengan realisasi pendapatan lain-lain yang berasal dari optimalisasi aset sebesar Rp. 6,450 Miliar, atau 75,1% terhadap RKAP 2019 atau 172,0% dibandingkan realisasi tahun 2018.

Dari sisi keuangan, proses restrukturisasi utang bank non produktif telah dimulai dengan proses restrukturisasi sederhana, yang akan dilanjutkan dengan proses restrukturisasi menyeluruh pada tahun 2020, dengan menunjuk PT PPA (Persero) sebagai konsultan restrukturisasi bisnis, keuangan serta optimalisasi aset. Dalam jangka panjang, diharapkan perbaikan secara signifikan pada kinerja Perusahaan dengan adanya restrukturisasi secara menyeluruh.

II.1.2 Asumsi Indeks Makro Ekonomi Indonesia

Realisasi RKAP 2019 ini menggunakan asumsi indeks makro ekonomi Indonesia sebagai berikut:

Table II-1
Asumsi Indeks Makro Ekonomi Indonesia
Realisasi 2018, RKAP 2019 dan Realisasi 2019

No	Uraian		Realisasi 2018	RKAP 2019	Realisasi 2019
1.	Pertumbuhan Ekonomi Nasional	%	5,1	5,4	5,4
2.	Tingkat Inflasi IHK	%	3,1	3,5	3,5
3.	Tingkat Suku Bunga Dana/Deposito (IDR)	%	5,0	5,0	5,0
4.	Tingkat Suku Bunga Kredit (KMK) (IDR)	%	10,5	10,5	10,5
5.	Suku Bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN)	%	4,9	5,3	5,3
6.	Nilai Tukar Valas	(\$/Rp)	14.427	13.700 sd 14.000	14.000,0

Sumber: Laporan Realisasi APBN 2018, APBN 2019

II.1.3 Realisasi Pencapaian Kinerja Tahun 2019

II.1.3.1 Pemasaran dan Penjualan

Perolehan kontrak penjualan konsolidasi tahun 2019 sebesar Rp. 653,56 Miliar terdiri dari kontrak penjualan induk perusahaan sebesar Rp. 597,24 Miliar dan kontrak penjualan anak perusahaan yang dapat dikonsolidasikan sebesar Rp. 56,32 Miliar dengan penjelasan sebagai berikut:

Table II-2
Perolehan Kontrak Penjualan, Penjualan dan Saldo Kontrak Realisasi 2019

(Rp. Juta)				
Uraian	Induk	Anak Perusahaan PT IPMS	Anak Perusahaan PT INTEN	Total Konsolidasian
1 Saldo Kontrak Per 1 Jan 2019	753.320,5	3.809,5	239,9	757.369,9
Eliminasi Kontrak	-	644	2.543,9	10.998,9
2 Realisasi Perolehan Kontrak 2019	605.048,6	9.571,3	46.752,9	653.561,6
Eliminasi Sales		3.980	4.558	15.548,7
3 Realisasi Penjualan 2019	363.960,2	8.855,1	29.573,3	395.377,7
4 Realisasi Amandemen Kontrak 2019				-
5 Realisasi Saldo Kontrak Per 31 Des 2019	994.408,9	4.525,7	17.419,5	1.015.553,8

II.1.3.2 Pemasaran Produksi Barang dan Jasa

Realisasi produksi barang dan jasa tahun 2019 sebagian besar diperkirakan turun, kecuali untuk Outsite Plan direalisasikan akan naik semula 4 lokasi pada tahun 2018 menjadi 60 lokasi, dengan gambaran sebagai berikut:

Table II-3
Produksi Barang dan Jasa
Realisasi 2018, RKAP 2019 dan Realisasi 2019

Uraian		Satuan	Realisasi Tahun 2018	RKAP Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2018	% Pencapaian Thd RKAP	% Pertumbuhan
1		2	3	4	5	5	6=5/4	7=(3-5)/5
Produksi Barang:								
1	ADSB	unit	-	19	-	-	-	-
2	FAT CPE/NTE	unit	-	-	410	-	-	-
3	Radar	unit	7	-	-	7	-	(100,00)
4	Meter Gas Prabayar	unit	4.417	-	-	4.417	-	(100,00)
5	KWh Meter	unit	173	-	-	173	-	(100,00)
6	MPOS	unit	5.060	15.000	322	5.060	0,02	(93,64)
7	E-Voting	unit	210	-	-	210	-	(100,00)
8	E-KTP	unit	878	-	166	878	-	(81,09)
9	Set Top Box (ZTE)	unit	-	166.800	-	-	-	-
Produksi Jasa:								
1	SPMS	transaksi	117.138	-	5.842	117.138	-	(95,01)
2	MSC Installation	lokasi	64	-	48	64	-	(25,00)
3	OSP	lokasi	4	-	17	4	-	-
4	IKR Migrasi	lokasi	-	-	19	-	-	-
5	Maintenance Sagem Indosat	Paket	1	-	3	1	-	200,00

II.1.4 Sumber Daya Manusia

II.1.4.1 Posisi Karyawan

Realisasi jumlah karyawan pada posisi 31 Desember 2019 adalah sebanyak 473 orang, atau berkurang 87 orang yang sebagian besar merupakan pegawai yang telah memasuki usia pensiun. Berikut realisasi biaya tenaga kerja seperti pada tabel di bawah ini:

Table II-4
Posisi Karyawan Konsolidasi
Realisasi 2018, RKAP 2019 dan Realisasi 2019

Uraian	Realisasi 2018	RKAP 2019	Realisasi 2019
Berdasarkan Jenjang Pendidikan :			
1 SLTA, dll	245	210	188
2 D 3 / Akademi	45	66	36
3 S1	245	257	225
4 S2 dan S3	25	21	24
Jumlah	560	554	473
Berdasarkan Usia (Tahun) :			
<= 30	132	174	106
2 31 - 40	87	85	93
3 41 - 50	89	106	52
4 51 - 55	252	189	222
Jumlah	560	554	473

Table II-5
Biaya Tenaga Kerja Konsolidasi
Realisasi 2018, RKAP 2019 dan Realisasi 2019

(Rp Juta)

Uraian	Realisasi 2018	RKAP 2019	Realisasi 2019	% Realisasi 2019 thd Real. 2018	% Realisasi 2019 thd RKAP 2019
1	2	3	4	5=(4/2)	6=(4/3)
1 Tenaga Kerja	88.212,4	196.576,3	89.742,8	101,7	45,7
2 Kesejahteraan Pegawai	12.596,7	37.932,0	9.981,2	79,2	26,3
Jumlah Beban Tenaga Kerja	100.809,1	234.508,2	99.724,1	98,9	42,5

II.1.4.2 Program Seminar dan Pelatihan

Realisasi 2019 untuk program seminar dan pelatihan adalah sebesar Rp.999,4 juta atau 21,17% terhadap RKAP 2019 dan 57,0% terhadap realisasi 2018.

Table II-6
Program Seminar dan Pelatihan
Realisasi 2018, RKAP 2019 dan Realisasi 2019

(Rp Juta)

Uraian	Realisasi 2018	RKAP 2019	Realisasi 2019	% Realisasi 2019 thd Real. 2018	% Realisasi 2019 thd RKAP 2019
1	2	3	4	5=(4/2)	6=(4/3)
1 Sertifikasi Pegawai	25,9	3.611,4	999,4	3.864,66	27,67
2 Rekrutmen	25,9	1.110,0	-	-	-
3 Seminar dan Pelatihan	1.701,6	-	-	-	-
Jumlah Beban Seminar dan Pelatihan	1.753,3	4.721,4	999,4	57,00	21,17

II.1.5 Corporate Social Responsibility (CSR)

Realisasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) tahun 2019 sebesar Rp. 242,9 Juta dengan program kegiatan sebagai berikut:

Table II-7
Corporate Social Responsibility (CSR)
Realisasi 2018, RKAP 2019 dan Realisasi 2019

(Rp Juta)

Uraian	Realisasi 2018	RKAP 2019	Realisasi 2019	% Realisasi 2019 thd Real. 2018	% Realisasi 2019 thd RKAP 2019
1	2	3	4	5=(4/2)	6=(4/3)
1 Pelestarian Lingkungan	-	-	-	-	-
2 Bantuan Pendidikan (Sarana dan atau Beasiswa)	9,4	15,0	-	-	-
3 Kesehatan Lingkungan	-	12,0	7,5	-	62,50
4 Melaksanakan Program Pemerintah	30,0	100,0	229,4	764,59	229,38
5 Aktivitas tanggung jawab sosial	105,0	23,0	6,0	5,71	26,09
			-		
Jumlah Corporate Social Responsibility	144,4	150,0	242,9	168,3	161,9

BAB III. RENCANA KERJA & ANGGARAN PERUSAHAAN TAHUN 2020 DENGAN DAMPAK PANDEMIK COVID-19

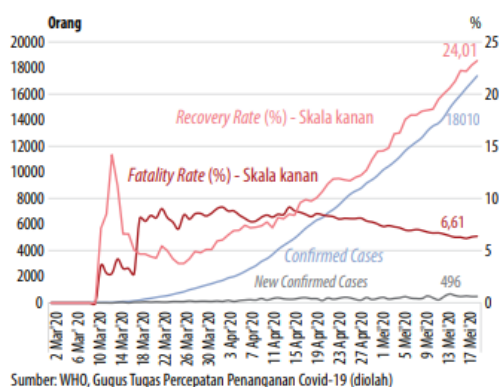
III.1 Gambaran Umum

Pandemi COVID-19 yang meluas ke seluruh dunia makin menekan perekonomian global. Pandemi COVID-19 yang meluas dan disertai berbagai upaya penanggulangan pembatasan aktivitas masyarakat menyebabkan pertumbuhan ekonomi triwulan I 2020 di banyak negara menurun tajam. Perkembangan April 2020 menunjukkan risiko resesi ekonomi global tetap besar tercermin pada kontraksi kinerja sektor manufaktur dan jasa serta keyakinan konsumen dan bisnis. Volume perdagangan dunia diperkirakan terkontraksi dan diikuti menurunnya harga komoditas. Dengan proyeksi kontraksi ekonomi berlanjut hingga triwulan III 2020, Bank Indonesia memprakirakan ekonomi global 2020 tumbuh negatif 2,2% dan kembali meningkat pada 2021 menjadi 5,2% didorong dampak positif kebijakan yang ditempuh di banyak negara dan faktor *base effect*. Sementara itu, ketidakpastian pasar keuangan global meningkat tinggi pada Maret 2020 dan sempat memicu aliran modal keluar dari banyak negara, termasuk dari negara berkembang ke aset yang dianggap aman. Perkembangan selanjutnya menunjukkan ketidakpastian pasar keuangan global mulai mereda dan mendorong berkurangnya aliran modal keluar dari negara berkembang serta diikuti menurunnya tekanan nilai tukar mata uang negara berkembang.

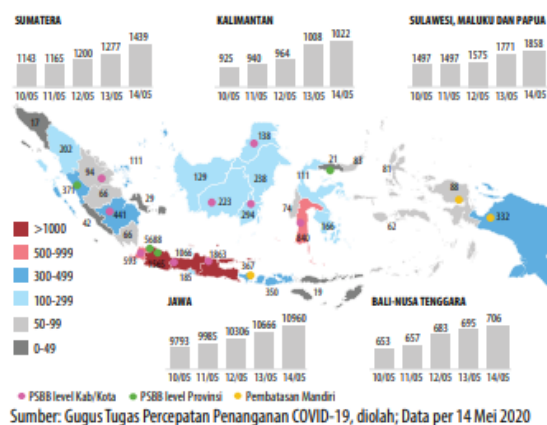
Sementara penyebaran pandemi COVID-19 di Indonesia cukup tinggi pada periode laporan. Hingga 18 Mei 2020, jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia telah mencapai 18.010. Penambahan angka new confirmed cases dan total kasus positif masih dalam lintasan yang meningkat dan diperkirakan belum mencapai titik puncaknya (Gambar III-1). Secara nasional, angka kematian (*fatality rate*) akibat pandemi COVID-19 di Indonesia merupakan yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Secara spasial, pandemi COVID-19 telah menyebar ke seluruh provinsi di Indonesia (Gambar III-2), dengan penyebaran tertinggi terjadi di wilayah Jawa. Sebagai mitigasi penyebaran pandemi COVID-19, beberapa daerah, baik level provinsi maupun kabupaten/kota telah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Penyebaran pandemi COVID-19 domestik tersebut beserta upaya penanggulangannya dan kontraksi ekonomi global menurunkan kinerja perekonomian domestik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I 2020 melambat terutama dipengaruhi oleh menurunnya kinerja ekspor jasa sejalan dengan penerapan berbagai upaya penanggulangan pandemi COVID-19 di global dan domestik yang membatasi mobilitas masyarakat dan kemudian menurunkan aktivitas ekonomi. Sementara itu, kepanikan di pasar keuangan global yang sempat meningkat tinggi pada Maret 2020 memicu pembalikan arus modal asing dan menurunkan kinerja pasar keuangan. Perkembangan terkini sejak April 2020 menunjukkan ketidakpastian pasar keuangan global mulai mereda yang kemudian berdampak positif pada berkurangnya aliran modal keluar dan menopang ketahanan eksternal Indonesia. Aliran masuk modal asing yang kembali naik mendorong kembali

menguatnya nilai tukar Rupiah. Stabilitas perekonomian juga tetap terjaga tercermin dari inflasi yang tetap rendah dan stabilitas sistem keuangan yang terjaga.

Gambar III-1 Grafik Penyebaran Pandemi COVID-19 Nasional¹



Gambar III-2 Grafik Penyebaran Pandemi COVID-19 Spasial



III.1.1 Perkembangan Ekonomi Global

Pandemi COVID-19 terus menyebar ke berbagai belahan dunia pada periode laporan sedangkan penyebaran di Tiongkok mereda. Penyebaran pandemi COVID-19 di luar Tiongkok meluas dengan cepat ke berbagai negara di dunia. Sampai dengan 18 Mei 2020, pandemi COVID-19 telah menyebar ke 214 negara atau mencakup 99,8% PDB global dengan jumlah kasus mencapai lebih dari 4,7 juta jiwa. Penyebaran terbesar di AS dan Eropa tercermin dari banyaknya jumlah kasus (confirmed cases) (Tabel III-1). Sementara itu, memasuki pertengahan Maret 2020 perkembangan pandemi COVID-19 di Tiongkok telah melewati puncaknya. Jumlah kasus dan tingkat kematian (fatality rate) menurun dibarengi dengan tingkat kesembuhan yang meningkat. Perbaikan itu diikuti dengan mulai berjalannya kegiatan produksi dan kembalinya mobilitas masyarakat mendekati pola normalnya.

¹ Laporan Kebijakan Moneter Triwulan I 2020 Bank Indonesia

Table III-1 Confirmed Cases COVID-19²

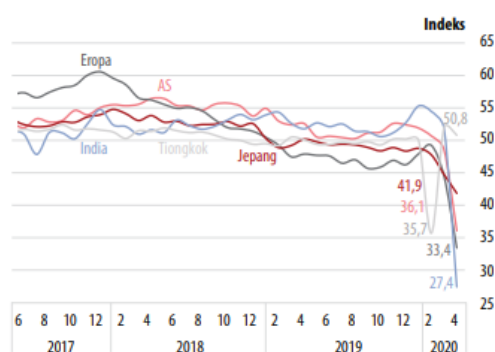
No	Negara	Kasus Positif	Total Meninggal	Tingkat Kematian (%)	Total Sembuh
1	Amerika Serikat	1.527.664	90.978	5,96	346.389
2	Rusia	281.752	2.631	0,93	67.373
3	Spanyol	277.719	27.650	9,96	195.945
4	Inggris	243.695	34.636	14,21	N/A
5	Brasil	241.080	16.118	6,69	94.122
6	Italia	225.435	31.908	14,15	125.176
7	Prancis	179.569	28.108	15,65	61.213
8	Jerman	176.651	8.049	4,56	153.400
9	Turki	149.435	4.140	2,77	109.962
10	Iran	120.198	6.988	5,81	94.464
33	Indonesia	17.514	1.148	6,55	4.129
	Negara lainnya yang terdampak	1.358.554	64.165	4,72	604.393
	Total	4.799.266	316.519	6,60	1.856.566

Sumber: Worldometer, per 18 Mei 2020

Penyebaran pandemi COVID-19 yang meluas ke berbagai negara tersebut menekan pertumbuhan ekonomi global. Penanggulangan penyebaran pandemi COVID-19 melalui berbagai upaya pembatasan mobilitas penduduk baik antara wilayah maupun antar negara telah menyebabkan penurunan permintaan dan terganggunya proses produksi global. Perkembangan beberapa indikator dini menunjukkan ekonomi global pada triwulan I 2020 mencatat kontraksi sangat tajam. Kinerja manufaktur di banyak negara mencatat pertumbuhan negatif yang signifikan antara lain seperti tercermin pada penurunan tajam Purchasing Manager Index (PMI) di AS, Eropa, Jepang, Tiongkok dan India (Gambar III-3). Kinerja sektor jasa di beberapa negara tersebut juga mengalami kontraksi yang lebih dalam dari kontraksi sektor manufaktur (Gambar III-3). Selain itu, keyakinan konsumen dan pelaku bisnis di berbagai negara turut memburuk sejalan penurunan permintaan dan gangguan produksi.

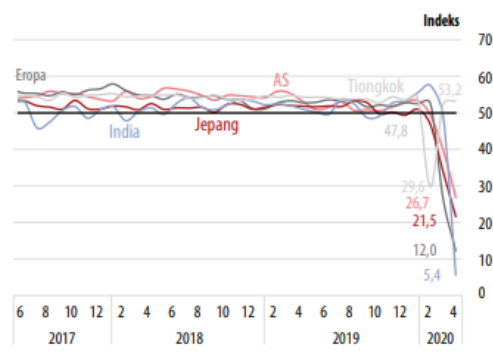
Gambar III-3 Grafik PMI Sektor Manufaktur & Jasa³

Sektor Manufaktur



Sumber: IHS Markit, ISM (AS), Bloomberg (Tiongkok), diolah

Sektor Jasa



Sumber: IHS Markit, ISM (AS), Bloomberg (Tiongkok), diolah

² Laporan Kebijakan Moneter Triwulan I 2020 Bank Indonesia

³ Laporan Kebijakan Moneter Triwulan I 2020 Bank Indonesia

Perkembangan ini menyebabkan penurunan tajam pertumbuhan ekonomi banyak negara, baik di negara maju maupun berkembang. Pada triwulan I 2020, pertumbuhan ekonomi AS turun dalam menjadi 0,3% dan diperkirakan mengalami kontraksi yang lebih dalam pada triwulan II 2020. Perlambatan ini disebabkan dampak rambatan (spillover) dari pelemahan ekonomi Tiongkok pada Januari-Februari dan penyebaran pandemi COVID-19 di AS sejak Maret 2020. Sementara itu, ekonomi Eropa mengalami kontraksi -3,3% (yoy) akibat pelemahan permintaan domestik dan ekspor sejalan perlambatan ekonomi di berbagai negara di kawasan tersebut. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok juga mencatatkan kontraksi yang dalam hingga -6,8% (yoy) akibat kebijakan pembatasan mobilitas penduduk selama penanganan pandemi COVID-19 yang menurunkan berbagai aktivitas ekonomi.

Dengan risiko penurunan yang tetap besar, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan mengalami kontraksi pada 2020 dan kembali pulih pada 2021. Perkembangan hingga April 2020 menunjukkan risiko resesi ekonomi global tetap besar. Hal ini tercermin pada berlanjutnya kontraksi di beberapa indikator dini seperti kinerja sektor manufaktur dan jasa serta keyakinan konsumen dan bisnis. Dengan proyeksi kontraksi ekonomi berlanjut hingga triwulan III 2020, Bank Indonesia memprakirakan ekonomi global 2020 tumbuh negatif 2,2%. Proyeksi yang lebih dalam disebabkan dampak pandemi COVID-19 yang diperkirakan lebih besar dari prakiraan sebelumnya serta pengaruh second round pemburukan ekonomi Tiongkok yang lebih dalam. Pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan kembali meningkat pada 2021 menjadi 5,2% didorong dampak positif kebijakan yang ditempuh di banyak negara dan faktor *base effect*.

Prakiraan tersebut sejalan dengan proyeksi IMF dan Consensus Forecast (Tabel III-1). Berbagai negara menempuh kebijakan ultraakomodatif guna memitigasi risiko resesi tersebut. Di kebijakan moneter, Bank sentral di banyak negara melakukan penurunan suku bunga kebijakan dan injeksi likuiditas. Sejak awal 2020, penurunan suku bunga kebijakan berkisar 30-150bps, dengan penurunan suku bunga terbesar dilakukan oleh Bank Sentral AS dan Bank Sentral Kanada hingga 150 bps. Pelonggaran moneter juga dilakukan dengan kebijakan Quantitative Easing (QE) dalam jumlah besar melalui berbagai instrumen, seperti pembelian obligasi pemerintah, penurunan Giro Wajib Minimum, dan Emergency Purchase Programme. Di kebijakan fiskal, otoritas di banyak negara mengeluarkan stimulus dengan nilai berkisar 0,1-20% PDB. Stimulus fiskal diarahkan untuk beberapa hal seperti peningkatan anggaran kesehatan, peningkatan dan perluasan jaring pengaman sosial serta dukungan dunia usaha termasuk relaksasi perpajakan, serta penyiapan anggaran program pemulihan ekonomi.

Table III-2 Proyeksi PDB Negara di Dunia Tahun 2020⁴

																						% yoy
PDB	2018	WEO (IMF)									Consensus Forecast (CF)											
		Oktober 2019			Januari 2020			April 2020			Februari 2020			Maret 2020			April 2020			Mei 2020		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Dunia	3,6	3,0	3,4	3,6	2,9	3,3	3,4	2,9	-3,0	5,8	2,9	3,1	3,4	2,9	2,8	3,4	2,9	-0,9	5,0	2,9	-3,1	5,6
Negara Maju	2,2	1,7	1,7	1,6	1,7	1,6	1,6	1,7	-6,1	4,5	1,7	1,4	1,6	1,7	1,1	1,7	1,7	-4,9	4,1	1,7	-5,9	4,7
Amerika Serikat	2,9	2,4	2,1	1,7	2,3	2,0	1,7	2,3	-5,9	4,7	2,3	1,9	2,0	2,3	1,6	2,0	2,3	-4,0	3,9	2,3	-5,4	4,3
Eropa	1,9	1,2	1,4	1,4	1,2	1,3	1,4	1,2	-7,5	4,7	1,2	0,9	1,2	1,2	0,6	1,3	1,2	-5,7	5,4	1,2	-7,9	6,2
Jepang	0,3	0,9	0,5	0,5	1,0	0,7	0,5	0,7	-5,2	3,0	1,0	0,3	0,8	0,7	-0,7	1,1	0,7	-3,3	2,1	0,7	-5,5	2,4
Negara Berkembang	4,5	3,9	4,6	4,6	3,7	4,4	4,6	3,7	-1,0	6,6	3,7	4,6	4,8	3,7	4,1	4,8	3,7	1,9	5,8	3,7	-0,8	6,4
Tiongkok	6,6	6,1	5,8	5,9	6,1	6,0	5,8	6,1	1,2	9,2	6,1	5,6	5,8	6,1	5,2	6,1	6,1	2,0	7,8	6,1	1,4	8,1
India	5,3	6,1	7,0	7,4	4,8	5,8	6,5	5,0	1,9	7,4	4,8	5,0	5,9	5,0	5,0	5,7	5,0	2,7	6,3	5,0	0,2	7,2
ASEAN-5	5,3	4,8	4,9	5,2	4,7	4,8	5,1	4,8	-0,6	7,8	4,7	4,4	4,8	4,8	3,8	4,6	4,8	0,0	5,6	4,8	-2,1	5,6
Amerika Latin	1,1	0,2	1,8	2,4	0,1	1,6	2,3	0,1	-5,2	3,4	0,1	1,6	2,3	0,1	0,9	2,1	0,1	1,3	2,3	0,1	-4,2	3,0
Emerging Europe	3,1	1,8	2,5	2,5	1,8	2,6	2,5	2,1	-5,2	4,2	1,8	2,2	2,5	2,1	2,2	2,5	2,1	1,9	2,6	2,1	-5,1	4,1
MENA	1,0	0,1	2,7	2,7				1,2	-3,3	4,2												

Sumber: IMF, Consensus Forecast, diolah

III.1.2 Perkembangan Perekonomian Domestik

Perkembangan realisasi APBN tahun 2020 sampai dengan 31 Maret 2020 mencatatkan pendapatan negara sebesar Rp. 375,95 Triliun atau tumbuh 7,72 persen (yoy). Di sisi lain, realisasi belanja negara mencapai sebesar Rp. 452,39 Triliun atau relatif sama dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dengan kombinasi realisasi tersebut, defisit anggaran sampai dengan 31 Maret 2020 berada pada level 0,45 persen terhadap PDB (tahun 2019 0,65 persen terhadap PDB). Rincian dari realisasi APBN 2020 sampai dengan 31 Maret 2020 tersebut meliputi :

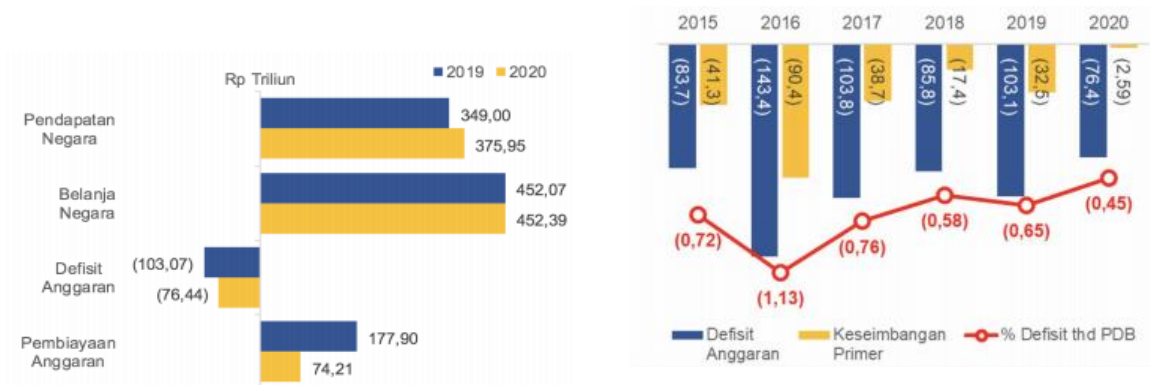
- Penerimaan Perpajakan mencapai Rp. 279,89 Triliun, meningkat 0,43 persen (yoy) dibandingkan realisasi periode yang sama APBN tahun 2019 sebesar Rp. 278,69 Triliun. Realisasi penerimaan perpajakan terdiri atas:
 - Realisasi Penerimaan Pajak mencapai Rp. 241,61 Triliun, lebih rendah 2,47 persen (yoy) dari tahun 2019 sebesar Rp. 247,72 Triliun.
 - Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp. 38,28 Triliun, tumbuh sebesar 23,60 persen (yoy) dari tahun 2019 sebesar Rp. 30,97 Triliun.
- Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencatat realisasi sebesar Rp. 95,99 Triliun. Realisasi tersebut tumbuh 36,80 persen (yoy) dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp. 70,16 Triliun.
- Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp. 277,89 Triliun, meningkat 6,58 persen (yoy) dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp. 260,74 Triliun.
- Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp. 174,50 Triliun, lebih rendah 8,79 persen (yoy) dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp. 191,33 Triliun

Melihat realisasi pendapatan negara dan belanja negara tersebut, maka realisasi defisit APBN tahun 2020 sampai dengan 31 Maret 2020 mencapai Rp. 76,44 Triliun atau 0,45 persen PDB, dimana keseimbangan primer mencapai negatif Rp. 2,59 Triliun. Dengan realisasi pembiayaan anggaran periode sampai dengan 31 Maret 2020 sebesar

⁴ Laporan Kebijakan Moneter Triwulan I 2020 Bank Indonesia

Rp. 74,21 Triliun, sehingga terdapat kekurangan pembiayaan anggaran sebesar Rp. 2,23 Triliun. Sehubungan dengan dampak penyebaran COVID-19 saat ini Kementerian Keuangan sedang dalam proses mendetailkan Peraturan Presiden Nomor 54/2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan merupakan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Kementerian Keuangan sebagai pengelola Keuangan Negara dalam menjaga Perekonomian yang terganggu akibat Pandemi Virus Corona.

Gambar III-4 Grafik Info APBN ⁵



Perkembangan ekonomi makro pada Maret 2020 menggambarkan masih terjaganya inflasi. Inflasi Maret 2020 tercatat sebesar 0,10 persen (mtm), atau 0,76 persen (ytd) atau 2,96 persen (yoy) pemerintah pun memiliki ruang gerak untuk menjaga target inflasi hingga akhir tahun sebesar 3,1 persen. Pergerakan nilai tukar Rupiah tertekan hingga mencapai diatas level Rp16.000 per USD dan per 13 April nilai tukar Rupiah berada pada level Rp 15.480 per USD atau terdepresiasi sebesar 11,4 persen dibandingkna nilai tukar pada awal tahun. Pergerakan nilai tukar ini sangat dipengaruhi oleh adanya arus modal keluar dari emerging market seiring kecenderungan investor menempatkan dana pada safe obligasi (UST) yang menyebabkan yield UST-10Y ke level terendah dan penguatan dollar index. Sementara itu, cadangan devisa hingga akhir Maret 2020 tercatat USD121 Miliar menurun dibandingkan posisi bulan sebelumnya sebesar USD130 Miliar. Penurunan disebabkan karena untuk pembayaran utang pemerintah dan intervensi BI terhadap tekanan nilai tukar Rupiah. Cadangan devisa tersebut diyakini mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan kedepan.

Dampak pandemic COVID-19 mempengaruhi kinerja sektor pariwisata. Jumlah wisman pada Februari 2020 menurun sebesar 28,9 persen (yoy) seiring penerapan travel ban. Jumlah wisman pada Februari 2020 tercatat sebesar 855 ribu atau secara kumulatif sebesar 1,1 juta wisman lebih rendah dari tahun lalu sebesar 2,4 juta wisman. Tingkat

⁵ Laporan Kebijakan Moneter Triwulan I 2020 Bank Indonesia

hunian kamar hotel pada Februari 2020 tercatat sebesar 49,22 persen sedikit lebih tinggi dari Januari 2020 sebesar 49,17 persen. Kedepan, sektor pariwisata dan perhotelan kemungkinan besar akan mengalami penurunan tajam seiring eskalasi pandemic COVID-19 di dalam negeri.

Dengan kondisi yang berat karena pandemi COVID-19 yang menimbulkan masalah bagi keselamatan masyarakat, serta implikasi ekonomi dan keuangan yang sangat luas, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Perpu ini merupakan pondasi bagi pemerintah, otoritas perbankan, dan otoritas keuangan untuk melakukan langkah-langkah luar biasa dalam menjamin kesehatan masyarakat, menyelamatkan perekonomian nasional, dan stabilitas sistem keuangan. Poin penting dalam Perpu tersebut adalah :

1. Pemerintah memutuskan total tambahan belanja dan pembiayaan APBN Tahun 2020 untuk penanganan COVID-19 adalah sebesar Rp405,1 Triliun.
2. Anggaran bidang kesehatan akan diprioritaskan untuk perlindungan tenaga Kesehatan, insentif dokter, perawat, dan tenaga rumah sakit, santunan kematian tenaga medis, dan penanganan permasalahan kesehatan lainnya.
3. anggaran perlindungan sosial akan diprioritaskan untuk penambahan keluarga penerima manfaat PKH, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, pembebasan biaya listrik 3 bulan untuk 24 juta pelanggan listrik 450 VA, dan diskon 50 persen untuk 7 juta pelanggan 900 VA.
4. stimulus ekonomi bagi UMKM dan pelaku usaha melalui penggratisan PPh 21 untuk para pekerja sektor industri pengolahan penghasil maksimal Rp200 juta, pembebasan PPN impor untuk wajib pajak impor untuk tujuan ekspor, percepatan restitusi PPN pada 19 sektor tertentu untuk menjaga likuiditas pelaku usaha, dan penundaan pembayaran pokok dan bunga untuk semua skema KUR yang terdampak COVID-19 selama 6 bulan
5. di bidang non-fiskal guna menjamin ketersediaan barang yang saat ini dibutuhkan, termasuk bahan baku industri, pemerintah melakukan beberapa penyederhanaan larangan terbatas (lartas) ekspor, penyederhanaan larangan terbatas atau lartas impor, serta percepatan layanan proses ekspor-impor melalui national logistic ecosystem.

III.1.3 Kebijakan Pemerintah

III.1.3.1 Rencana Pemerintah Jangka Menengah (RJPM) Tahun 2020 - 2024

Sebagai perusahaan BUMN, PT INTI tentunya mengacu pada rencana pembangunan Pemerintah baik jangka menengah maupun jangka pendek. Berikut 7 (tujuh) agenda Pembangunan RPJMN IV tahun 2020 – 2024.

III.1.5 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020

Sejalan dengan tema RKP dan tema kebijakan fiskal 2020 yaitu “APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas SDM”, maka fokus RAPBN 2020 adalah sebagai berikut:

1. Mendukung pemantapan reformasi birokrasi untuk mendorong produktivitas ASN melalui pemberian gaji/pensiun ke-13, THR, dan antisipasi reformasi skema pensiun.
2. Penguatan efisiensi, kualitas, dan kredibilitas belanja yang akan dilakukan dengan melanjutkan efisiensi belanja nonprioritas; melanjutkan perbaikan mekanisme program perlindungan sosial; pemenuhan kewajiban Pemerintah secara tepat waktu dalam rangka menjaga kredibilitas; serta penguatan sinergi dan koordinasi antara K/L, Pemda, dan instansi lainnya.
3. Mendukung program prioritas dan agenda strategis yang difokuskan untuk penguatan kualitas sumber daya manusia untuk mendorong produktivitas dan inovasi serta daya saing; mendorong penguatan investasi dan ekspor; mempercepat pembangunan infrastruktur untuk mendukung peningkatan kapasitas produksi dan daya saing serta transformasi industrialisasi; serta antisipasi ketidakpastian dan penanganan isu-isu strategis.

Dengan memperhatikan rencana program kerja masing-masing K/L berikut adalah 10 besar anggaran belanja K/L dalam RAPBN tahun 2020 sebesar total Rp. 687,3 Triliun atau 77,69% dari total rencana anggaran tahun 2020 sebesar Rp. 884,6 Triliun.

Table III-4 10 Besar Anggaran Belanja K/L RAPBN 2020

No.	Nama Kementerian/Lembaga	RAPBN 2020 (Triliun Rp.)
1.	Kementerian Pertahanan	127,4
2.	Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat	120,2
3.	POLRI	90,3
4.	Kementerian Agama	65,1
5.	Kementerian Sosial	62,8
6.	Kementerian Kesehatan	57,4
7.	Kementerian Keuangan	43,5
8.	Kementerian Perhubungan	42,7
9.	Kementerian RISTEK & DIKTI	42,2
10.	Kementerian Pendidikan & Kebudayaan	35,7
	Total	687,3

Selain rencana belanja negara berdasarkan organisasi, RAPBN juga menyajikan proyek prioritas yang antara lain adalah proyek-proyek pembangunan infrastruktur, dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Mendorong akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi industrialisasi dan untuk merespon revolusi Industri 4.0
 2. Mendorong pembangunan infrastruktur di perkotaan untuk antisipasi urbanisasi (antara lain transportasi massal perkotaan, air bersih dan sanitasi, dan perumahan yang layak huni)
 3. Mendukung pemerataan pembangunan antarwilayah
 4. Mendorong peran swasta maupun BUMN dalam rangka membiayai proyek strategis nasional melalui skema pembiayaan kreatif
 5. Mengoptimalkan opsi-opsi kerja sama KPBU sebagai strategi kebijakan pembiayaan jangka panjang di luar APBN
 6. Meningkatkan koordinasi lintas sektoral termasuk dengan Pemda selaras dengan target nasional
 7. Meningkatkan komitmen untuk pembangunan sekaligus pemeliharaan infrastruktur terutama pada K/L yang terkait infrastruktur.
- Berikut adalah rincian anggaran infrastruktur perbandingan 2019 dan RAPBN 2020.

Table III-5 Rincian Anggaran Infrastruktur RAPBN 2020 (dalam Triliun Rupiah)

Uraian	Outlook 2019	RAPBN 2020
I. Infrastruktur Ekonomi	384,8	405,2
1. Melalui Belanja K/L	144,8	170,0
a1. 1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	97,0	117,3
2. Kementerian Perhubungan	35,8	38,6
3. Kementerian Pertanian	0,7	0,9
4. Kementerian ESDM	1,8	2,1
5. Kementerian Komunikasi dan Informatika	3,0	3,3
2. Melalui Belanja Non K/L	2,6	3,5
a1. 1. VGF (termasuk Cadangan VGF)	0,3	0,8
2. Belanja Hibah	2,0	2,2
3. Melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa	192,4	199,9
a1. 1. Dana Alokasi Khusus Fisik	31,8	32,7
2. Tambahan Otonomi Khusus Infrastruktur Prov. Papua & Papua barat	4,3	4,7
3. Perkiraan Dana Desa Untuk Infrastruktur	27,9	28,8
4. Perkiraan Transfer Umum untuk Infrastruktur	128,4	130,0
4. Melalui Pembiayaan	45,0	31,8
a1. 1. FLFP	5,2	9,0
2. BLU LMAN	22,0	10,5
II. Infrastruktur Sosial	10,2	8,8
a1. 1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	1,9	1,9
2. Kementerian Agama	1,6	2,0
3. Kementerian Kesehatan	0,4	0,4
III. Dukungan Infrastruktur	4,8	5,3
a1. 1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	2,7	3,1
2. Kementerian DTP dan Transmigrasi	0,1	2,1
Jumlah	399,7	419,2

Sumber: Kementerian Keuangan

Dalam rangka akselerasi penyelesaian proyek-proyek infrastruktur, Pemerintah menyediakan 3 (tiga) alternatif jenis KPBU yaitu KPBU Project Development Facility, KPBU Viability Gap Fund dan KPBU Availability Payment. Berikut potensi proyek yang dapat diselesaikan dengan mekanisme KPBU.

Gambar III-10 Tahapan Penyehatan dan Pertumbuhan Perusahaan



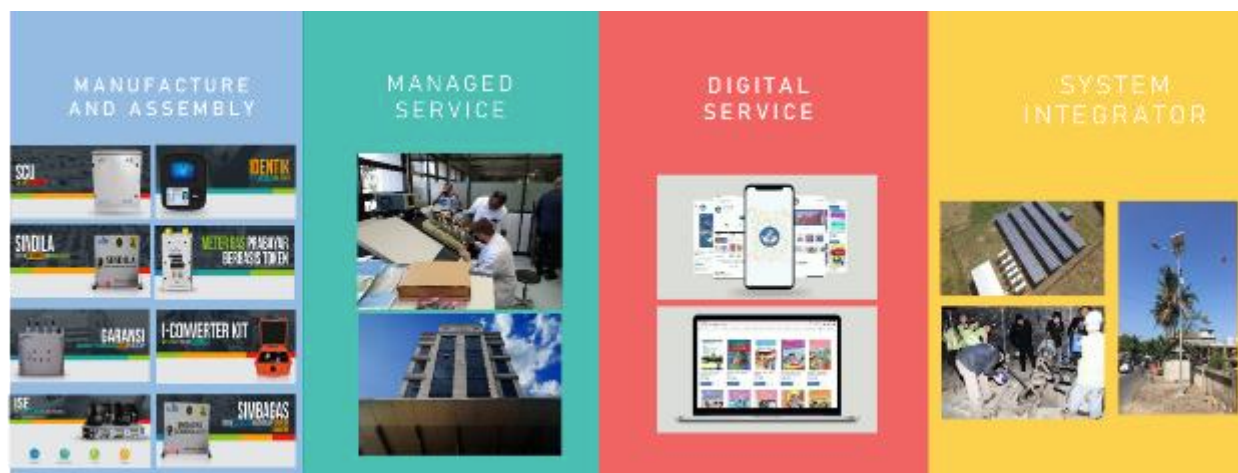
Secara struktur organisasi, untuk dapat mencapai rencana jangka panjang tersebut, dilakukan pemisahan fungsi yaitu fungsi penetrasi pasar eksisting dan pengembangan pasar serta pengembangan portfolio baru dan diversifikasi usaha. Fungsi penetrasi pasar eksisting dan pengembangan pasar merupakan fungsi lini pemasaran. Sedangkan fungsi pengembangan portfolio baru dan diversifikasi usaha merupakan fungsi lini pengembangan bisnis.

Gambar III-11 Portofolio Bisnis Perusahaan 2020



Adapun produk-produk yang akan menjadi unggulan di tahun 2020 dibagi menjadi beberapa kategori yang dituangkan dalam Portofolio Produk Perusahaan sebagai berikut:

Gambar III-12 Produk Unggulan Tahun 2020



INTI Smart Industrial Park adalah kawasan industri modern yang dirancang sebagai penggerak utama (*prime mover*) tumbuhnya kapasitas dan kapabilitas manufaktur nasional. *INTI Smart Industrial Park* direncanakan untuk memfasilitasi kegiatan manufaktur secara terintegrasi terdiri dari produksi mekanik, plastik, elektronik dan optikal, baik produk genuine INTI maupun produk alih teknologi dari mitra.

Sampai dengan saat ini, PT INTI telah bekerja sama dengan berbagai mitra untuk memproduksi barang yang sejalan dengan kebutuhan PT INTI, antara lain sebagai berikut:

1. PT Inti Pindad Mitra Sejati (IPMS), menghasilkan produk antara lain: Railpad dan Insulator untuk kebutuhan Rel Kereta Api, Pistol Grib dan Komponen Senjata untuk PT Pindad, Tower dan Tiang untuk kebutuhan sektor Telekomunikasi.
2. PT Inti Global Optical Communication (PT. IGOC) merupakan perusahaan *joint venture* antara IPMS dengan Global Optical Communication Co., Ltd. (GOC) dari Korea Selatan yang menghasilkan Produk Kabel Fiber Optik dan aksesorisnya.
3. PT DMT merupakan perusahaan *joint operation* antara PT INTI dan PT Trinitan Global Pasifik dalam bidang perakitan lampu LED.
4. PT INTI Smart Teknologi (PT. ISTEK) adalah merupakan perusahaan *joint venture* antara PT. Inti Konten Indonesia (Intens) yang merupakan anak perusahaan PT INTI dengan Linyang Energy Co. Ltd. dari China. PT ISTEK yang menghasilkan Produk KWH Meter Pra Bayar.

Gambar III-13 Rencana Pengembangan INTI Smart Industrial Park



Gambar III-14 Pabrik INTI di Palasari



Adapun produk yang saat ini dikembangkan dan dapat dikomersialisasi antara lain sebagai berikut:

1. Konverter Kit

Paket konverter kit bagi nelayan kecil bertujuan memberikan kemudahan akses energi kepada masyarakat dan hal ini juga bisa memberikan dampak positif kepada nelayan melalui penghematan pengeluaran biaya bahan bakar, serta membantu ekonomi masyarakat nelayan menuju ekonomi masyarakat mandiri. Konverter Kit Ini juga ramah lingkungan serta mengurangi konsumsi BBM bersubsidi. Paket konverter kit dari BBM ke elpiji terdiri atas beberapa komponen, yaitu mesin penggerak, konverter kit, as panjang, baling-baling, 2 buah tabung elpiji 3 kg, dan aksesoris pendukung lainnya PT INTI telah melakukan Pendistribusian Paket LPG untuk nelayan dalam rangka mendukung program Kementrian ESDM.

Gambar III-15 Konverter Kit PT INTI



2. Gas Meter Pra Bayar

Meter Gas Pra Bayar PT INTI (**Meter Gas Prabayar (IGM - 1.6Q)**) merupakan alat ukur untuk gas yang mengalir, yang dipakai sebagai pengukur volume dan besarnya biaya pemakaian. Alat ini bekerja pada tekanan tertentu dan terpasang keypad yang berfungsi untuk menginput nomor seri token di saat pengisian. Gas meter ini menggunakan sistem prepaid yang berarti penggunaan gas baru bisa dilakukan setelah dilakukan pembayaran.

Gambar III-16 Meter Gas Pra Bayar PT INTI



Smart meter akan mencatat konsumsi energi/sumber daya dalam interval satu jam atau kurang dan mengkomunikasikan informasi tersebut ke utilitas untuk keperluan Monitoring dan *Billing*. Smart Metering dapat digunakan untuk Monitoring dan *Billing* energi listrik, gas maupun konsumsi air. *Advanced Metering Infrastructure* (AMI) adalah teknologi yang mengintegrasikan *Information Communication Technology* (ICT), untuk mendeskripsikan keseluruhan infrastruktur dari Smart Meter dengan menggunakan jaringan telekomunikasi dengan sistem komunikasi dua arah dari smart meter ke *Network Operation Center* dan semua aplikasi yang memungkinkan pengumpulan dan pengiriman informasi tentang penggunaan energi mendekati *real-time*. Teknologi telekomunikasi yang dapat digunakan untuk mendukung *smart meter* yaitu serat optik, *power line carrier* (PLC) maupun *Radio link*.

3. MPOS - INTI Pay

MPOS (*mobile point of sale*) adalah sistem pembayaran non tunai yang bersifat *mobile*, dengan keuntungan berupa transaksi keuangan secara aman, hemat biaya, dan memungkinkan pemilik usaha kecil melakukan transaksi tanpa harus berinvestasi dalam jumlah besar.

MPOS dapat beroperasi sebagai perangkat yang berdiri sendiri yang hanya terhubung ke rekening bank atau bisa menjadi komponen terintegrasi dari sistem jaringan POS yang lebih besar. Untuk melindungi data pemegang kartu, data pelanggan dienkripsi dan disimpan di *cloud* dan bukan di perangkat.

Gambar III-17 Perangkat MPOS PT INTI



4. E-Voting & E-KTP Reader

E-voting adalah produk dan jasa layanan untuk pemilihan umum, pilkada atau pilkades dengan produk genuine E-KTP Reader. E-voting memiliki fitur e-Verifikasi sehingga tidak ada pemilih ganda dan langsung diperoleh hasilnya melalui e-Counting. Untuk menjamin keabsahan dokumen maka tahap selanjutnya adalah e-Rekapitulasi, yakni pembubuhan tandatangan digital.

Sistem e-Voting dari PT INTI pernah dilaksanakan pada Pilkades serentak di Sulawesi Selatan dan di Pemalang. Pilkades di Pemalang dilakukan secara di 18 desa di Kabupaten Pemalang. Meskipun perlu membagi menjadi beberapa gelombang Pilkades, namun hingga saat ini semua gelombang pemilihan berjalan dengan baik.

Gambar III-18 e-Voting & e-KTP Reader PT INTI



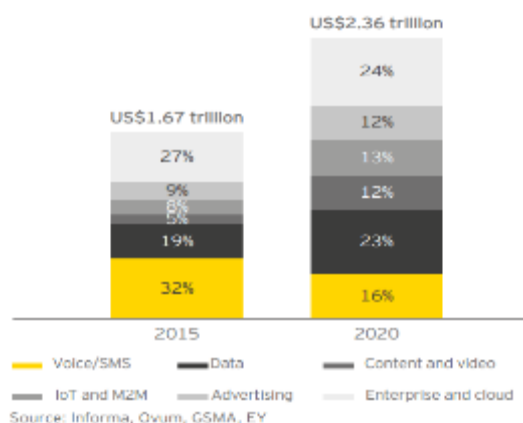
5. Tabung Gas Komposit

Trend teknologi dunia dalam sektor energi antara lain adalah penggunaan teknologi komposit sebagai tabung gas. Beberapa negara di dunia telah dikenal mengembangkan dan menggunakan tabung gas komposit ini antara lain Inggris, Jerman, Norwegia, Malaysia, China dan Korea Selatan. Tabung gas komposit

III.2.2.3 Digital Service

Bisnis digital erat dengan perubahan lansekap bisnis telekomunikasi. Industri telekomunikasi telah mengalami dekade yang sangat menantang dengan sejumlah disrupsi yang terjadi. Revolusi *smartphone* telah menyebabkan ledakan dalam permintaan data, diikuti dengan pertumbuhan aplikasi seluler dengan konsep *sharing economy* dan *frictionless marketplace*. Disinilah pemain industri disruptif menghasilkan pendapatan melalui aplikasi yang memberikan *customer experience* yang baru.

Gambar III-19 Proyeksi Valuasi Ekosistem Digital TMT



Riset EY menunjukkan bahwa pada tahun 2020, secara global pertumbuhan nilai bisnis digital akan lebih besar pada data, konten & video, IOT dan iklan. Sedangkan untuk enterprise & cloud cenderung turun namun memiliki porsi terbesar dalam bisnis teknologi, media dan telekomunikasi (TMT). Voice & sms diperkirakan akan turun prosentase sharing nilainya semula 32% menjadi 16% (gambar III-13). Sebagian besar pemain global dalam sektor TMT akan memfokuskan pada digital business model, customer experience dan cost control sebagai strategi utama tahun 2020⁹.

Indonesia dengan jumlah penduduk usia produktif yang cukup tinggi, merupakan pasar yang sangat luas untuk industri digital. Berdasarkan data APJII, 64,8% penduduk Indonesia telah memiliki akses kepada internet pada tahun 2018, dan terus meningkat dengan prosentase pertumbuhan pengguna 10,12% per tahunnya

Secara ekonomi, e-commerce merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi digital di Asia Tenggara, berkat berbagai promosi yang menarik, hiburan yang tersedia di dalam aplikasi dan pengantaran yang lebih cepat¹⁰. Riset Google, Temasek dan Bain & Company dalam SEA Internet Economy Report 2019, menyebutkan bahwa Indonesia merupakan *leader* dalam internet economy di Asia Tenggara. Hal ini didukung dengan kompetisi dalam layanan e-commerce dan taksi online. Seluruh sektor ini mendapatkan manfaat dari perkembangan penggunaan *digital payments*.

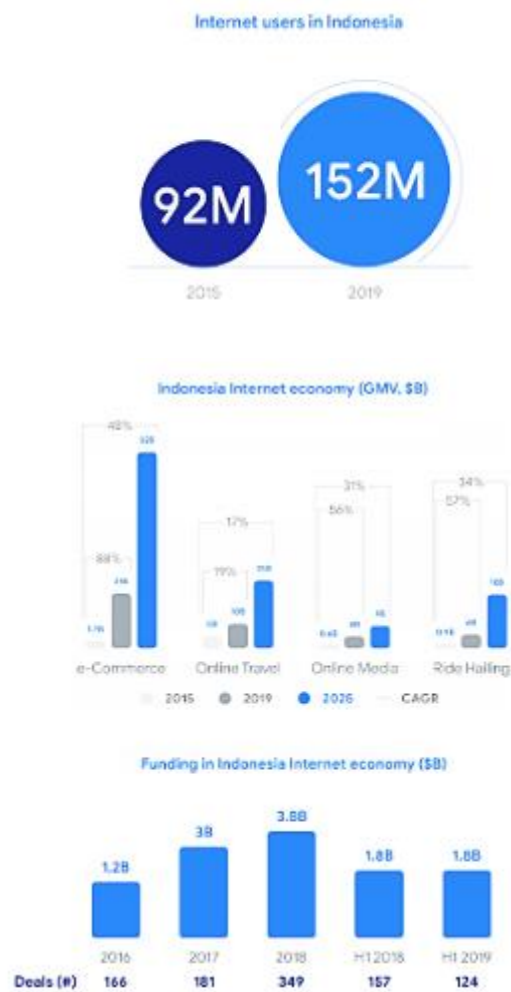
⁹ EY Digital Transformation from 2020 and Beyond, 2019

¹⁰ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/03/indonesia-kontributor-terbesar-ekonomi-digital-di-asean>

Gambar III-20 Pengguna Internet di Indonesia 2018



Gambar III-21 Internet Economy Indonesia 2019



Sebagai upaya untuk mengikuti perkembangan sektor digital, PT INTI terus mengembangkan produk dan jasa yang terkait di sektor digital terutama pada layanan IT enterprise dan digital payments serta jasa konten melalui anak perusahaan PT INTENS, dengan target buyer perbankan, BUMN dan instansi pemerintah antara lain melalui produk dan jasa layanan MPOS – INTI Pay dan E-Voting & E-KTP Reader, platform B2B commerce (SIPLah), cyber defense dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

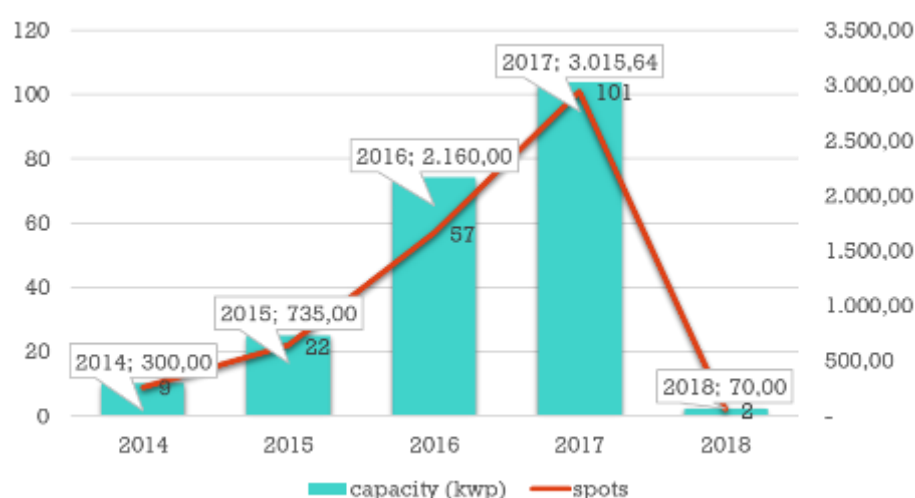
III.2.2.4 System Integrator

Perusahaan telah bergelut dalam lini bisnis system integrator khususnya sebagai EPC contractor sektor telekomunikasi sejak tahun 1994 dan berkembang ke sektor energy terbarukan sejak 2013 sehingga komposisi penjualan yang berasal dari lini bisnis system integrator mencapai > 50% pada tahun 2019. Pekerjaan system integrator yang dilakukan oleh Perusahaan antara lain proyek pembangunan PLTS dengan bouwheer Kementerian ESDM dan PT PLN (Persero) serta pembangunan fasilitas Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) dengan bouwheer Kementerian ESDM.

1. PLTS

Dalam rangka mendukung energi baru dan terbarukan, PT INTI telah berpartisipasi dalam pembangunan PLTS sebagai EPC contractor sejak tahun 2014, dengan data sebagai berikut.

Gambar III-22 Partisipasi PT INTI (Persero) dalam Pembangunan PLTS



2. Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS)

Dalam rangka pemerataan infrastruktur dan peningkatan sumber energi terbarukan, penggunaan PJU-TS semakin digalakkan terutama untuk lokasi-lokasi terpencil yang belum terjangkau oleh jaringan listrik.

Lampu PJU LED menggunakan catu daya arus searah atau *rectifier*. PJU ini mampu menyala dan redup sendiri sesuai pasokan matahari dan menggunakan "LED" dalam sinarnya, sehingga lebih hemat dari segi pemakaian energi.

Penggunaan energi dari tenaga matahari dan 'retrofit' lebih hemat dibandingkan sebelumnya yang menggunakan listrik, sehingga bisa menghemat anggaran daerah dalam menerangi jalan.

Lampu PJU Menggunakan PV pada umumnya terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu modul panel surya, lampu LED, baterai, dan tiang penyangga. Modul panel surya mempunyai *lifetime* cukup panjang yang berfungsi menerima cahaya matahari yang kemudian dikonversi menjadi listrik melalui proses photovoltaic, sedangkan lampu LED dapat mencapai *lifetime* yang jauh lebih lama dibanding teknologi lain dengan sumber daya DC. Baterai yang digunakan adalah baterai bebas perawatan *maintenance free*. Dengan demikian, sistem PJU ini dapat menghemat biaya operasional dan perawatan secara signifikan.

Sepanjang tahun 2018, PT INTI telah menyelesaikan pekerjaan PJU-TS sebanyak 5.393 titik di P. Jawa, P. Sulawesi, P. Sumatera dan NTB untuk penanggulangan bencana. Di tahun 2019, saat ini sedang diselesaikan 1.200 titik pembangunan PJU-TS di P. Kalimantan.

Gambar III-23 PJU LED dengan PV Support



Table III-14 Perolehan Kontrak Penjualan, Penjualan dan Saldo Kontrak
RKAP 2019, Realisasi 2019 dan RKAP 2020

Uraian	Induk	Anak Perusahaan PT IPMS	Anak Perusahaan PT INTEN	Total Konsolidasian
1 Saldo Kontrak Per 1 Jan 2020	994.408,9	4.525,7	17.419,5	1.016.354,1
Eliminasi Kontrak				
2 Rencana Perolehan Kontrak 2020	1.290.689,3	18.671,5	35.619,9	1.344.980,8
Eliminasi Sales		6.158	113	
3 Rencana Penjualan 2020	959.379,0	13.605,2	29.929,4	1.002.913,7
4 Rencana Amandemen Kontrak 2020	306.279,6	0,3		306.279,9
5 Rencana Saldo Kontrak Per 31 Des 2020	1.019.439,6	9.591,7	23.110,0	1.052.141,2

III.4.1.2 Sumber Daya Manusia

Table III-15
Posisi Karyawan Konsolidasi RKAP 2019, Realisasi 2019 dan RKAP 2020

Uraian	RKAP 2019	Realiasi 2019	RKAP 2020
Berdasarkan Jenjang Pendidikan :			
1 SLTA, dll	210	188	190
2 D 3 / Akademi	66	36	39
3 S1	257	225	284
4 S2 dan S3	21	24	27
Jumlah	554	473	540
Berdasarkan Usia (Tahun) :			
1 <= 30	174	106	151
2 31 - 40	85	93	102
3 41 - 50	106	52	66
4 51 - 55	189	222	221
Jumlah	554	473	540

III.4.1.3 Biaya Tenaga Kerja

Table III-16
Beban Tenaga Kerja Konsolidasi RKAP 2019, Realisasi 2019 dan RKAP 2020

(Rp Juta)

Uraian	RKAP 2019	Realisasi 2019	RKAP 2020	% RKAP 2020 thd RKAP 2019	% RKAP 2020 thd Real. 2019
1	2	3	4	5=(4/2)	6=(4/3)
1 Tenaga Kerja	196.576,3	89.742,8	75.934,0	38,6	84,6
2 Kesejahteraan Pegawai	37.932,0	9.981,2	3.054,0	8,1	30,6
Jumlah Beban Tenaga Kerja	234.508,2	99.724,1	78.988,0	33,7	79,2

III.4.1.4 Biaya Pengembangan SDM

Transformasi Kompetensi SDM dilakukan dengan cara memberikan Pembekalan Pengetahuan Produk dan *Soft Skills Initiative* dan *Information Seeking* untuk semua bagi karyawan, sedangkan pembekalan kompetensi per *jobstream* menggunakan metode *e-learning* dan sertifikasi, baik sertifikasi internal maupun dari lembaga sertifikasi. Anggaran untuk program seminar dan pelatihan di tahun 2020 adalah sebesar Rp 1,2 Miliar.

Table III-17
Biaya Seminar dan Pelatihan RKAP 2019, Realisasi 2019 dan RKAP 2020

(Rp Juta)

Uraian	RKAP 2019	Realisasi 2019	RKAP 2020	% RKAP 2020 thd RKAP 2019	% RKAP 2020 thd Real. 2019
1	2	3	4	5=(4/2)	6=(4/3)
1 Tenaga Kerja	196.576,3	89.742,8	75.934,0	38,6	84,6
2 Kesejahteraan Pegawai	37.932,0	9.981,2	3.054,0	8,1	30,6
Jumlah Beban Tenaga Kerja	234.508,2	99.724,1	78.988,0	33,7	79,2

III.4.1.5 Corporate Social Responsibility (CSR)

Anggaran *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebesar Rp 150,0 juta dengan program kegiatan sebagai berikut:

Table III-18
Corporate Social Responsibility (CSR)
RKAP 2019, Realisasi 2019 dan RKAP 2020

(Rp Juta)					
Uraian	RKAP 2019	Realisasi 2019	RKAP 2020	% RKAP 2020 thd RKAP	% RKAP 2020 thd Real.
1	2	3	4	5=(4/2)	6=(4/3)
1 Pelestarian Lingkungan	-	-	20,0	-	-
2 Bantuan Pendidikan (Sarana dan atau Beasiswa)	15,0	-	20,0	133,33	-
3 Kesehatan Lingkungan	12,0	7,5	15,0	125,00	200,00
4 Melaksanakan Program Pemerintah	100,0	229,4	80,0	80,00	34,88
5 Aktivitas tanggung jawab sosial	23,0	6,0	15,0	65,22	250,00
Jumlah Corporate Social Responsibility	150,0	242,9	150,0	100,00	61,76

III.4.1.6 Beban-beban

1. Beban Operasi dan Usaha Konsolidasi

Anggaran beban operasi dan usaha tahun 2020 adalah sebesar Rp. 964.209,9 Miliar atau 196,7% dari realisasi 2019 dengan gambaran sebagai berikut:

III.4.3.7 Kontribusi Pajak

Table III-33
Kontribusi Pajak RKAP 2020

(Rp. Juta)

Uraian	Nilai
I. Penerimaan Pusat	
1 PPh Pasal 21	4.423
2 PPh WP Badan :	-
PPh Pasal 22 Impor	3.897
PPh Pasal 22 Dalam Negeri	-
PPh Pasal 23 (WABA)	-
PPh Pasal 4 (2) (WABA)	-
3 PPh Pasal 22 (WAPU)	18.059
4 PPh Pasal 23 (WAPU)	12.996
5 PPh Pasal 4 Ayat 2 (WAPU)	9.444
6 PPN Neto	89.503
7 PPh Pasal 25 / Pasal 29	864
Jumlah I	139.187
II. Penerimaan Daerah	
PBB	1.170
Jumlah II	1.170
TOTAL (Jumlah I + II)	140.356

III.4.3.8 Anak Perusahaan

Strategi parenting dikembangkan Perusahaan untuk memberdayakan secara optimal sumber daya dan kapabilitas Perusahaan bagi pembangunan nilai setiap Sektor Bisnis Perusahaan dan sekaligus pula menghasilkan sinergi di antara berbagai Sektor Bisnis tersebut. Strategi ini fokus pada kompetensi inti (*core competencies*) perusahaan induk (*parent corporation*) dan pada nilai yang diciptakan dari hubungan antara induk dan unit-unit bisnisnya.

PT INTI untuk RJPP 2020 – 2024 menekankan pada model parenting yang ingin dicapai setiap fase pertumbuhan perusahaan. Pada fase #INTIBangkit, model parenting yang diadopsi adalah integrated operating company, yang mana perusahaan fokus pada integrasi menyeluruh baik produk, marketing, kastemer maupun efisiensi biaya, termasuk dalam pengendalian risiko.

Pada tahun 2020 pula, ditetapkan kembali pondasi interaksi fungsi dan peran antara induk dan anak perusahaan. Sebagai aliansi dalam mensukseskan target jangka panjang perlu mempertimbangkan mengenai kemungkinan transfer kompetensi, kolaborasi dalam pemasaran produk *genuine* serta perkuatan modal yang lebih optimal diantara

PENUTUP

1. Realisasi penjualan konsolidasi tahun 2019 sebesar Rp. 395,4 Miliar atau 14,4% dari RKAP 2019. Penjualan tersebut didominasi oleh sektor ICT dan Energi diantaranya dari proyek PJU, PLTS dan penjualan perangkat dan aplikasi Teknologi Informasi.
2. Dengan nilai penjualan tersebut tahun 2019 Perusahaan memproyeksikan total laba komprehensif periode berjalan konsolidasi sebesar Rp. (434,76) Miliar.
3. Tahun 2020 Perusahaan menargetkan total laba komprehensif periode berjalan konsolidasi sebesar Rp. 787,0 Juta dengan penjualan sebesar Rp. 1,009,2 Triliun.
4. Tingkat Kesehatan Perusahaan tahun 2020 berada pada kategori Kurang Sehat “BB” dengan skor 48,5

Hal-hal yang Perlu Mendapat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS):

1. Persetujuan dan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) & Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun 2020.
2. Penetapan *Key Performance Indicator* Direksi yang tertuang dalam Kontrak Manajemen tahun 2020
4. Penetapan *Key Performance Indicator* Dewan Komisaris tahun 2020.

BAB IV. RENCANA KERJA DEWAN KOMISARIS

IV.1 Pendahuluan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, Dewan Komisaris diwajibkan menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan dan indikator pencapaian kinerja (*key performance indicators*) Dewan Komisaris sebagai pedoman kerja dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya.

Penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan serta indikator pencapaian kinerja Dewan Komisaris bertujuan untuk mengukur pelaksanaan akuntabilitas Dewan Komisaris tentang tanggung jawabnya dengan melaporkan kepada RUPS, berupaya menciptakan peringatan pertama (*early warning system*) akan munculnya problem substansial yang signifikan jika gejala penurunan kinerja perusahaan secara drastis mulai terjadi, dan sebagai *self-assessment* seberapa jauh efektivitas pengawasan berhasil mengarahkan kinerja manajemen mencapai sasaran bisnis Perseroan, serta upaya Dewan Komisaris menemukan problem yang menghalangi tercapainya sasaran bisnis.

IV.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) Dewan Komisaris ini bertujuan untuk menjadikan panduan Dewan Komisaris melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagaimana diamanatkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dicapai suatu hasil yang pelaksanaannya sistimatis, efektif dan efisien.

IV.3 Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris

Sesuai dengan Anggaran Dasar PT INTI (Persero), Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. Pengawasan Dewan Komisaris diantaranya adalah pengawasan terhadap persetujuan dan pengawasan atas pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta pengawasan atas kepatuhan Direksi terhadap ketentuan Anggaran Dasar, Keputusan RUPS, dan menjaga agar Perseroan selalu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris tersebut, Dewan Komisaris berkewajiban untuk:

- 1) Memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroan;
- 2) Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disiapkan oleh